



OPINI

Dulu Saya Simpati ke Gibran

Oleh Redaksi • 11 Okt, 20:56 WIB



Oleh: Prof Henri Subiakto

SAYA kenal Pak Jokowi sebelum beliau jadi presiden. Saya kagum dengan penampilannya yang sederhana. Halus tutur katanya, dan tampak kelihatan sabar. Pak Jokowi itu berbeda dengan elite Politik lain. Dia bukan keturunan ningrat. Bukan keluarga pejabat. Dia hanya berasal dari

rakyat biasa, seperti kebanyakan kita.

Itulah kekuatan Jokowi yang membuat jadi sosok yang menarik simpati. Jokowi jadi tokoh yang sangat berbeda latar belakang dan karakternya di banding elite-elite lain di tingkat nasional. Berbeda dengan Prabowo. Berbeda dengan SBY, berbeda pula dengan Megawati dan tokoh-tokoh lain. Jokowi

itu atributnya representasi rakyat kecil.

Daya tarik kesederhanaan Jokowi juga tampak dari penampilan kesederhanaan aktivitas anaknya, salah satunya Gibran. Sebagai anak presiden, Gibran dikesankan hanya sibuk bisnis martabak. Tidak tergantung kewenangan orang tua. Seolah Gibran tak mau berpolitik dan tak tertarik jabatan.

Dia anak yang sederhana, sebagaimana bapaknya.

Sayapun pernah ketemu di Bandara Solo, Gibran tampak tidak dikawal dan pergi ke Surabaya seperti rakyat biasa. Naik satu pesawat dengan saya. Sama-sama kena delay dan sempat kehujanan.

[Selengkapnya di halaman 18 »](#)

ACEH

Wali Nanggroe Terima Kunjungan MAPIM, Jajaki Kerja Sama Strategis Aceh–Malaysia



BANDA ACEH, BANDA ACEH – Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia, Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, menerima kunjungan silaturahmi dari delegasi Majelis Perundingan Pertubuhan Islam

Malaysia (MAPIM) di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh, Jumat sore 9 Oktober 2026.

[Selengkapnya di halaman 12 »](#)

NASIONAL

Isu Pansus di DPR RI Mengemuka, Andi Azwan Sebut Gibran Segera Tunjukkan Ijazah SD hingga Sarjana



BANDA ACEH -- Ketua Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menunjukkan dokumen riwayat pendidikannya, mulai dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan

tinggi, kepada publik dalam waktu dekat.

Menurut Andi, langkah tersebut diharapkan dapat menjelaskan riwayat pendidikan Gibran di tengah polemik dokumen ...

[Selengkapnya di halaman 2 »](#)

DALAM EDISI INI

NASIONAL	2
ACEH	12
INTERNASIONAL	14
LINGKUNGAN	16
Aneka Berita	18

NASIONAL

Rocky Gerung Pertanyakan Kedatangan Jokowi ke Rumah Prabowo: Menego-Mngingatkan Perjanjian Politik?



BANDA ACEH - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung mempertanyakan kedatangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke kediaman Presiden Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa (6/10) malam.

Pasalnya, kedatangan Jokowi ke rumah Prabowo bersamaan dengan agenda pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ...

[Selengkapnya di halaman 2 »](#)

LINGKUNGAN

Banjir Bandang Kembali Menerjang Nepal, Rumah dan Jembatan Hanyut di Gorkha



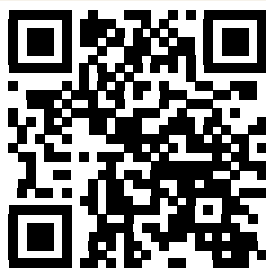
BANDA ACEH -- Banjir bandang kembali menerjang Nepal. Kali ini, banjir melanda Distrik Gorkha di wilayah tengah negara tersebut pada Minggu (11/10/2026), setelah longsoran material tanah menyumbat aliran Sungai Budhi Gandaki.

Bencana tersebut menyebabkan sejumlah rumah dan infrastruktur rusak, termasuk jembatan yang menghubungkan Distrik Gorkha dengan Distrik Dhading.

[Selengkapnya di halaman 16 »](#)

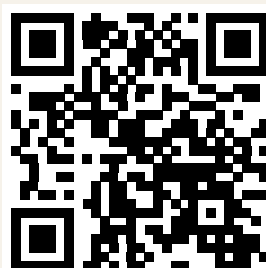
BACA LEBIH LENGKAP
www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP
www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Rocky Gerung Pertanyakan Kedatangan Jokowi ke Rumah Prabowo: Menego-Mningatkan Perjanjian Politik?

Oleh Redaksi · 11 Okt, 16.48 WIB



BANDA ACEH - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Rocky Gerung mempertanyakan kedatangan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) ke kediaman Presiden Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada Selasa (6/10) malam.

Pasalnya, kedatangan Jokowi ke rumah Prabowo bersamaan dengan agenda pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal syarat pendidikan calon wakil presiden (cawapres) Gibran Rakabuming Raka.

Rocky tak memungkiri, muncul berbagai interpretasi atas kedatangan Jokowi ke rumah Prabowo di Kertanegara.

"Lalu timbul interpretasi macam-macam, kenapa Pak Jokowi datang ke Kertanegara. Menego, menekan, mau mengingatkan perjanjian Politik," kata Rocky Gerung dalam sebuah diskusi publik bertajuk 'Ijazah SMA

Tak Ditemukan, Gibran Tetap Wapres!, dikutip Minggu (11/10).

"Akibatnya, opini publik muncul lagi di situ ada kesempatan untuk mempermainkan lagi ratio decidendi," sambungnya.

Rocky tak memungkiri, MK menangkap keresahan publik atas tidak ditemukannya ijazah SMA sederajat Gibran Rakabuming Raka.

"Jadi sebetulnya, Mahkamah juga secara tidak sengaja mengingatkan kegelisahan publik," ujarnya.

Ia memandang, pertimbangan MK yang tidak mendiskualifikasi Gibran untuk menghindari kecaucan politik. Karena itu, Rocky tak mempermasalahkan adanya pihak-pihak yang ingin membawa putusan MK tersebut ke DPR RI.

"Nah, tugas masyarakat sipil adalah mengepung DPR dengan pikiran atau bahkan dengan massa, supaya moral dari ratio decidendi itu tidak berubah menjadi politico

decidendi. Itu prinsipnya," tegasnya.

Namun, Rocky menyatakan akan sangat elegan jika Gibran mundur dari jabatan sebagai Wakil Presiden. Menurutnya, kesadaran moral itu seharusnya datang dengan sendirinya dari Gibran.

"Dan supaya itu tidak berlangsung lama, sangat elegan kalau Gibran bilang: 'Saya mengerti bahwa ratio decidendi itu artinya saya tidak layak lagi'. Kesadaran moral dari Gibran itu yang kita inginkan," ucapnya.

"Tapi mungkin itu 0,7%. Tapi kalau proses, dia legitimasi berlangsung panjang, 0,5 bisa jadi 20% dalam 2 hari, lalu jadi 80% dalam 3 hari, jadi 100% sebelum tanggal 20," tambahnya.

Menurutnya, akan sangat negarawan jika Gibran mundur dari jabatan Wapres RI.

"Gibran bilang, 'Saya mengerti ratio decidendi itu, walaupun saya tidak punya ijazah, tapi saya

mengerti rasio ratio decidendi itu', tegasnya.

Ia menyebut, sikap negarawan yang seharusnya dimiliki Gibran nantinya publik akan memberikan penghargaan. Hal itu juga untuk menghentikan terjadinya kegaduhan politik.

"Dan di situ dia jadi noble untuk menghentikan percocokan politik," tuturnya.

Lebih lanjut, Rocky menegaskan dirinya memang Anggota Wantimpres, tapi pernyataan tersebut tidak mewakili kapasitasnya sebagai Wantimpres. Ia pun menegaskan, dirinya Anggota Dewan Pertimbangan Presiden, bukan Wakil Presiden.

"Saya terangkan itu sekali lagi, sebagai anggota Wantimpres tidak mewakili pikiran dewan, karena setiap anggota punya hak untuk menerangkan pikirannya sendiri. Saya anggota Dewan Pertimbangan Presiden, bukan Dewan Pertimbangan Wakil Presiden," pungkaskanya

NASIONAL

Isu Pansus di DPR RI Mengemuka, Andi Azwan Sebut Gibran Segera Tunjukkan Ijazah SD hingga Sarjana

Oleh Redaksi · 11 Okt, 21.07 WIB



BANDA ACEH -- Ketua Militan Gibran 08 Nusantara, Andi Azwan, menyebut Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka akan menunjukkan dokumen riwayat pendidikannya, mulai dari sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi, kepada publik dalam waktu dekat.

Menurut Andi, langkah tersebut diharapkan dapat menjelaskan riwayat pendidikan Gibran di tengah polemik dokumen pendidikan yang kembali menjadi sorotan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan terkait syarat pendidikan Gibran saat pencalonan sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.

Andi menyampaikan hal itu ketika menanggapi munculnya usulan pembentukan panitia khusus (pansus) maupun penggunaan Hak Angket di DPR untuk menindaklanjuti persoalan tersebut.

Dikutip dari YouTube Kompas TV, Minggu (11/10/2026), Andi mengatakan Gibran akan menunjukkan dokumen pendidikannya pada waktu yang ditentukan.

"Itu nanti saatnya akan ditunjukkan oleh Mas Gibran semua ijazah-ijazah beliau itu ya dan itu saya tahu itu ada semua ijazah-ijazah itu," ucap Andi.

Ia berharap penjelasan langsung dari Gibran dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai riwayat pendidikannya sekaligus merespons berbagai pertanyaan yang berkembang.

"Inshaallah dalam waktu dekat ini nanti Mas Gibran sendiri akan membawa semua ijazah beliau dari SD sampai ijazah sarjana beliau, dalam waktu dekat ini untuk menjelaskan kepada publik

biar tidak ada lagi prasangka dari macam-macam orang-orang di sana yang mem-plot twist ya, menggoreng-goreng tentang riwayat pendidikan dari Mas Gibran itu sendiri," jelasnya.

Andi mengatakan, waktu penyampaian dokumen tersebut sepenuhnya menjadi keputusan Gibran. Namun, ia menyebut kemungkinan adanya penjelasan terbuka kepada masyarakat melalui konferensi pers.

"Inshaallah lah, segera-segera, nanti yang menentukan adalah Mas Gibran sendiri untuk itu. Tapi yang jelas pasti akan ada pemberitahuan kepada publik ya secara terang benderang, entah itu dengan pers konpres dan sebagainya," tambah Andi.

Ia juga berharap polemik yang berulang mengenai riwayat pendidikan Gibran dapat segera memperoleh penjelasan. Menurut Andi, persoalan tersebut perlu disikapi dengan mengacu pada bukti dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Memang kita harus menyudahi semua petualangan-petualangan mereka itu dengan evidence yang ada, yang selama ini yang menjadi target utama mereka adalah masalah ijazah itu, as soon as possible, Mas Gibran akan mengumumkan kepada publik, kita doakan aja, inshaallah kalau bisa minggu ini sudah segera diumumkan," tegasnya.

Meski demikian, hingga pernyataan Andi disampaikan, belum ada kepastian mengenai tanggal maupun mekanisme Gibran akan memperlihatkan dokumen pendidikan tersebut

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

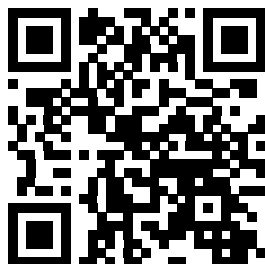
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Habib Umar Alhamid: ‘Raja Jawa’ Bikin Malu Indonesia, Prabowo Diminta Berani Bersih-bersih

Oleh Redaksi · 11 Okt, 12.09 WIB



BANDA ACEH - Ketua Umum Generasi Cinta Negeri (Gentari) Habib Umar Alhamid melontarkan kritik keras terhadap mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menilai berbagai persoalan yang menyeret nama Jokowi dan keluarganya telah memicu kejenuhan masyarakat, mulai dari polemik ijazah, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), hingga persoalan utang negara.

Habib Umar bahkan menyebut Jokowi sebagai “Raja Jawa” yang dinilainya telah membuat malu Indonesia. Ia mendesak Presiden Prabowo Subianto berani melakukan pembenahan pemerintahan dan memastikan penegakan hukum berjalan tanpa pandang bulu.

“Saya katakan Jokowi, si ‘Raja Jawa’ ini telah bikin malu Indonesia. Selain banyak melakukan kebohongan dan masuk dalam daftar orang terkorup yang telah dipublikasikan. Rakyat juga sudah jenuh dengan persoalan ijazah Jokowi dan bahkan kini ditambah dengan masalah ijazah anaknya,” ujar Habib Umar Alhamid kepada wartawan, Minggu (11/10/2026).

Pernyataan tersebut merupakan kritik Politik Habib Umar terhadap Jokowi dan keluarganya. Berbagai tuduhan yang disampaikan itu perlu ditempatkan sebagai pernyataan narasumber, bukan sebagai kesimpulan hukum mengenai pihak yang dikritik.

Habib Umar menilai polemik mengenai ijazah Jokowi yang kemudian diikuti perdebatan mengenai dokumen pendidikan putranya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, telah menyita perhatian masyarakat.

Menurut dia, persoalan tersebut perlu dijelaskan secara transparan agar tidak terus memicu perdebatan dan kegaduhan di tengah masyarakat.

Ia juga meminta Jokowi tidak lagi mencampuri urusan pemerintahan setelah menyelesaikan masa jabatannya sebagai presiden.

“Contohnya seperti presiden-presiden sebelumnya yang setelah pensiun tidak lagi cawe-cawe soal jabatan,” katanya.

Habib Umar menilai pemerintahan yang sedang berjalan perlu mendapatkan ruang untuk menjalankan agenda politik dan kebij-

kan negara tanpa bayang-bayang pemimpin sebelumnya.

“Berikan pemerintahan yang baru kebebasan agar memiliki ruang untuk menjalankan agenda politik dan kebijakan negara tanpa bayang-bayang penguasa sebelumnya,” jelasnya.

Selain polemik ijazah, Habib Umar menyoroti pembangunan IKN yang menjadi salah satu proyek besar pada era pemerintahan Jokowi.

Menurutnya, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan pembangunan nasional, terutama yang menyangkut kebutuhan anggaran besar, keberlanjutan proyek, dan manfaatnya bagi masyarakat.

Ia mengingatkan agar pembangunan tidak hanya berorientasi pada proyek-proyek berskala besar, tetapi juga harus menjawab kebutuhan rakyat.

Habib Umar juga menaruh perhatian terhadap persoalan utang negara. Ia menilai kewajiban pemerintah harus dikelola secara bertanggung jawab dan diimbangi dengan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.

Menurutnya, setiap kebijakan fiskal harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan tidak meninggalkan beban yang semakin berat bagi generasi mendatang.

Karena itu, ia meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap kebijakan sebelumnya, dengan mempertimbangkan efektivitas penggunaan anggaran, kemampuan fiskal negara, serta dampaknya terhadap kesejahteraan rakyat.

Habib Umar selanjutnya mendesak Presiden Prabowo Subianto menunjukkan kesungguhan dalam membenahi pemerintahan dan memperkuat penegakan hukum.

Ia menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan persoalan hukum menjadi berlarut-larut, terlebih jika menyangkut tokoh yang pernah menduduki jabatan penting di pemerintahan.

“Prabowo harus bersih-bersih dan tidak membantu Jokowi dan keluarganya. Rakyat ingin melihat penegakan hukum yang tegas.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Jika Gibran Dilengserkan, Yusuf Blegur: Jalan Terbuka Mengadili Jokowi

Oleh Redaksi · 11 Okt, 12.05 WIB



BANDA ACEH - Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dinilai berpotensi menjadi kekuatan sekaligus kelemahan Politik ayahnya, Joko Widodo (Jokowi). Di tengah polemik ijazah SMA Gibran dan menguatnya wacana pemakzulan, Presiden Prabowo Subianto dinilai menghadapi pilihan politik yang tidak mudah: mempertahankan Gibran atau mengambil langkah yang berpotensi mengubah peta kekuasaan nasional.

Direktur Eksekutif Institute for Public Policy Strategic (IPPS), Yusuf Blegur, menilai polemik yang membelit Gibran berpotensi menjadi pintu masuk bagi perubahan konstelasi politik, termasuk menyangkut pengaruh Jokowi dalam pemerintahan Prabowo.

Dalam analisis politiknya bertajuk Ketika Gibran Menjadi Kekuatan Sekaligus Kelemahan Jokowi, Sabtu (10/10/2026), Yusuf mempertanyakan kemungkinan Prabowo mengambil langkah politik terhadap Gibran, sekaligus bagaimana langkah tersebut dapat memengaruhi posisi politik Jokowi.

“Positioning Jokowi di ujung tanduk. Jika Gibran dilengserkan rakyat atau di-impeachment oleh DPR, boleh jadi itu menjadi jalan terbuka mengadili Jokowi. Tapi, mungkinkah? Bagaimana langkah politik Prabowo selanjutnya?” tulis Yusuf.

Menurut Yusuf, polemik ijazah Gibran setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 telah membuka babak baru perdebatan politik nasional. Ia menilai persoalan tersebut tidak hanya menyangkut Gibran sebagai wakil presiden, tetapi juga berpotensi memengaruhi posisi dan pengaruh politik Jokowi.

Yusuf menyoroti putusan MK yang menurut pembacaannya membuka ruang bagi perdebatan lebih lanjut mengenai persyaratan pendidikan Gibran. Ia menilai perkembangan tersebut dapat menjadi momentum bagi DPR dan partai-partai politik untuk menentukan sikap.

Namun, langkah politik selanjutnya tetap bergantung pada substansi putusan, ketentuan konstitusi, serta mekanisme hukum yang

berlaku. Polemik mengenai ijazah maupun dorongan pemakzulan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum oleh pihak yang dipersoalkan.

Yusuf berpendapat, posisi Gibran dalam pemerintahan dapat menjadi dilema bagi Prabowo. Di satu sisi, Gibran merupakan wakil presiden yang mendampingi Prabowo dalam pemerintahan. Di sisi lain, hubungan politik tersebut tidak bisa dilepaskan dari peran Jokowi dalam dinamika politik yang mengantarkan Prabowo ke kursi kepresidenan.

Menurut Yusuf, Prabowo masih harus memperhitungkan pengaruh informal Jokowi, jaringan politik, dukungan birokrasi, serta keberadaan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang selama ini dikaitkan dengan keluarga Jokowi.

“Bagi Prabowo, Gibran menjadi rantai politik yang menjadi beban, sandera dan sekaligus membatasi ruang gerak politiknya,” tulis Yusuf.

Ia menilai persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan Pilpres 2029, melainkan juga menyangkut upaya Prabowo memperkuat kendali pemerintahan dan memperluas ruang politiknya sendiri.

Dalam pandangan Yusuf, Prabowo perlu memperhitungkan kemungkinan munculnya persaingan pengaruh di lingkaran kekuasaan. Ia bahkan mengaitkannya dengan kekhawatiran mengenai dualisme kepemimpinan nasional atau situasi yang kerap disebut sebagai matahari kembar.

Yusuf menduga Prabowo akan berupaya memperkuat posisinya secara bertahap tanpa harus berkonfrontasi langsung dengan Jokowi.

Ia menghubungkan dugaan tersebut dengan strategi merangkul sejumlah tokoh yang dikenal kritis terhadap pemerintahan sebelumnya, termasuk Jurnis Hidayat, Syahganda Nainggolan, dan Rocky Gerung.

Yusuf juga menyinggung masuknya sejumlah aktivis yang sebelumnya berada dalam barisan oposisi ke dalam pemerintahan.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Bahlil, Zulhas dan Puan Maharani Berpotensi Gantikan Gibran Jadi Wapres

Oleh Redaksi · 11 Okt, 12.18 WIB



BANDA ACEH - Pengamat Politik dan hukum Muslim Arbi menyebut Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan (Zulhas), dan Ketua DPR RI Puan Maharani sebagai tiga tokoh yang berpotensi menjadi pengganti Gibran Rakabuming Raka apabila terjadi pergantian wakil presiden di tengah pemerintahan Prabowo Subianto.

Menurut Muslim, peluang ketiga tokoh tersebut layak diperhitungkan karena memiliki posisi strategis dalam peta Politik nasional dan dinilai mempunyai hubungan politik yang baik dengan Presiden Prabowo.

Wacana pergantian wakil presiden, kata Muslim, berkaitan dengan polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran yang kembali menjadi sorotan setelah putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipersoalkan sejumlah kalangan.

“Bahlil Lahadalia, Zulkifli Hasan, dan Puan Maharani potensial menjadi wakil presiden pengganti Gibran. Ketiganya memiliki

modal politik masing-masing dan loyalitas terhadap Prabowo dinilai tidak perlu diragukan,” kata Muslim dalam pernyataan kepada wartawan, Sabtu (10/10/2026).

Muslim menilai, apabila polemik mengenai kelayakan Gibran terus berkembang dan berujung pada proses politik yang memungkinkan pergantian wakil presiden, partai-partai pendukung pemerintah akan memiliki peran penting dalam menentukan figur pengganti.

Namun, pergantian wakil presiden bukan perkara yang dapat dilakukan hanya berdasarkan desakan publik atau pernyataan politik. Prosesnya harus mengikuti ketentuan konstitusi dan mekanisme yang berlaku.

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menjadi salah satu nama yang berpotensi masuk dalam perbincangan suksesi wakil presiden. Sebagai pimpinan salah satu partai besar di Indonesia, Bahlil memiliki akses terhadap jaringan politik nasional dan struktur partai yang tersebar di berbagai daerah.

Golkar juga mempunyai pengalaman panjang dalam pemerintahan serta posisi penting dalam koalisi politik. Dukungan partai dapat menjadi modal dalam membangun konsolidasi apabila terjadi perubahan komposisi kepemimpinan nasional.

Bahlil sendiri memiliki latar belakang sebagai pengusaha dan pernah menduduki sejumlah jabatan pemerintahan, termasuk Menteri Investasi/Kepala BKPM sebelum menjabat Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Kedekatan politik dengan pemerintahan Prabowo dapat menjadi salah satu faktor yang diperhitungkan. Meski demikian, peluang Bahlil untuk menjadi wakil presiden tetap bergantung pada perkembangan politik, sikap partai-partai koalisi, serta mekanisme konstitusional.

Di sisi lain, Golkar harus mempertimbangkan kepentingan organisasinya sendiri. Mengusung atau mendukung seorang kader untuk

menduduki jabatan wakil presiden akan berkaitan dengan strategi partai dalam mempertahankan pengaruh di pemerintahan.

Nama kedua yang disebut Muslim Arbi adalah Zulkifli Hasan, Ketua Umum PAN yang juga memiliki pengalaman panjang dalam politik nasional.

Zulkifli pernah menjabat Ketua MPR RI, Ketua Umum PAN, serta menduduki jabatan menteri dalam pemerintahan. Saat ini Zulkifli menjabat sebagai Menko Pangan.

Pengalaman tersebut memberikan jaringan politik dan pemahaman mengenai proses pengambilan keputusan di tingkat nasional.

PAN merupakan salah satu partai yang berada dalam barisan pendukung pemerintahan Prabowo. Posisi tersebut dapat menjadi modal bagi Zulkifli apabila muncul pembicaraan mengenai perubahan komposisi kepemimpinan nasional.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Deklarator FPP TNI: Gibran Wapres Haram, Harus Dimakzulkan!

Oleh Redaksi · 11 Okt, 12.14 WIB



BANDA ACEH - Deklarator Forum Purnawirawan Prajurit TNI (FPP TNI), Laksamana Pertama TNI (Purn.) Moeryono Aladin, melontarkan kritik keras terkait polemik persyaratan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Ia mendesak para pemegang kekuasaan negara tidak tinggal diam dan meminta persoalan tersebut ditanggapi secara serius demi menjaga martabat bangsa serta kehormatan konstitusi.

Moeryono menggunakan istilah keras dengan menyebut posisi Gibran sebagai wakil presiden sudah tidak layak dihormati apabila persoalan persyaratan pencalonannya tidak diselesaikan. Ia bahkan menyebut jabatan tersebut harus diganti.

“Wapres tidak memenuhi syarat itu kan sudah haram. Harus diganti, harus diganti. Dan orang sudah tidak bisa hormat lagi,” kata Moeryono di Podcast Forum Keadilan Madilog, Ahad (11/10/2026).

Menurut Moeryono, polemik yang menyangkut jabatan wakil presiden tidak boleh dianggap sebagai persoalan biasa. Ia menilai persoalan tersebut berkaitan dengan kehormatan lembaga negara, kepatuhan terhadap konstitusi, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Ia juga menyinggung kondisi psikologis Gibran di tengah tekanan Politik yang muncul. Namun, pernyataan tersebut merupakan penilaian pribadi Moeryono, bukan informasi yang dapat memastikan kondisi psikologis Gibran.

Moeryono menjelaskan bahwa surat terbuka FPP TNI tidak hanya ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto. Surat tersebut juga ditujukan kepada sejumlah pimpinan lembaga negara yang dinilai memiliki kewenangan untuk merespons persoalan konstitusional.

Pihak yang disasar antara lain Ketua DPR, Ketua MPR, Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Ketua Mahkamah Agung (MA), Jaksa Agung, serta pimpinan Kepolisian.

Menurut Moeryono, surat terbuka itu merupakan bentuk tanggung jawab moral para purnawirawan TNI terhadap negara dan konstitusi. Ia mempertanyakan sikap para pejabat tinggi negara yang menurut keterangannya tidak memberikan komentar setelah putusan MK yang ia rujuk pada 6 Oktober.

“Kenapa? Karena begitu ada putusan dari MK pada tanggal 6 Oktober, tidak ada satu komentar pun dari petinggi-petinggi negeri ini. Ini yang menyangkut wakil presiden,” ujarnya.

Moeryono menilai persoalan yang menyangkut persyaratan seorang wakil presiden semestinya memperoleh perhatian serius dari seluruh pemegang kekuasaan negara. Ia meminta para pejabat tidak menghindari perdebatan mengenai konstitusi hanya karena persoalan tersebut menyentuh figur politik tertentu.

Dalam pernyataannya, Moeryono juga menyinggung Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi. Ia mengaitkan perkembangan politik setelah putusan yang dimaksud dengan kunjungan Jokowi ke Kertanegara pada 6 Oktober.

Moeryono mempertanyakan apakah kepentingan keluarga atau tokoh politik tertentu lebih diutamakan daripada kepentingan bangsa dan kehormatan institusi negara.

“Martabat bangsa harus dipikirlin dong. Jangan martabat Jokowi yang dipikirlin,” tegasnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa kritik Moeryono tidak hanya diarahkan kepada Gibran, tetapi juga kepada para elite politik dan pejabat negara yang dinilai perlu memberikan penjelasan kepada publik.

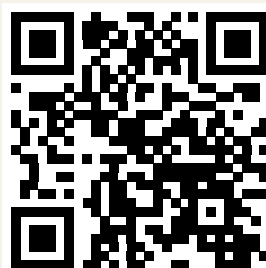
Ia bahkan berpendapat bahwa Presiden Prabowo seharusnya mengumpulkan para ketua umum partai politik untuk membahas persoalan tersebut. Menurutnya, komunikasi politik di tingkat tertinggi diperlukan agar persoalan yang berpotensi memicu polemik berkepanjangan dapat dibicarakan secara terbuka.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

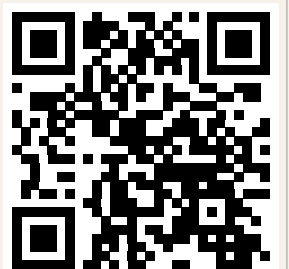
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Ferry Hongkiriwang Dinilai Punya Peran Dominan, Pengamat Pertanyakan Tak jadi Tersangka Kasus Febrie

Oleh Redaksi · 11 Okt, 12.11 WIB



BANDA ACEH - Pengamat hukum pidana Kamilov Sagala mempertanyakan belum ditetapkannya Ferry Yanto Hongkiriwang (FH) sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemerasan terhadap pengusaha properti Tan Kian yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah sebagai terdakwa.

Kamilov menilai terdapat kejanggalan dalam penanganan perkara tersebut. Menurut dia, Ferry disebut memiliki peran aktif dan dominan dalam dugaan pengancaman serta permintaan uang kepada Tan Kian, tetapi justru memperoleh perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

"Ada yang janggal dan aneh, FA didakwa pemerasan, dalam prakteknya pelaku yang menjalankan pemerasan FH secara nyata dan dominan dalam pengancaman permintaan uang kepada Tan Kian malah diberi perlindungan LPSK," kata Kamilov kepada wartawan, Minggu (11/10).

Ia berpandangan, peran Ferry dalam perkara tersebut semestinya menjadi salah satu fokus utama penyidikan. Kamilov merujuk pada dugaan keterlibatan Ferry dalam pertemuan dengan Tan Kian, pengancaman terkait penetapan tersangka dalam perkara korupsi PT Asuransi Jiwasraya, hingga permintaan uang senilai Rp 55 miliar.

Atas dasar itu, Kamilov menilai penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) semestinya terlebih dahulu mendalami pihak yang diduga berinteraksi langsung dengan korban. Menurutnya, pengungkapan peran setiap pihak perlu dilakukan secara menyeluruh agar konstruksi perkara dapat diuji berdasarkan bukti.

"Seharusnya FH lah jadi tersangka pertama, bisa saja dakwaan jaksa jauh dari sasaran tembaknya," tegas Kamilov.

Kamilov juga mengkritik pendekatan penanganan perkara yang dinilainya tidak dimulai dari pihak yang diduga melakukan tindakan secara langsung. Ia menduga pola

tersebut berpotensi membuat keterlibatan pihak lain tidak terungkap secara menyeluruh.

"Terbaca strategi jaksa ini ada agenda untuk melokalisir yang ditengahnya atau pelaku lainnya selain FA," tuturnya.

Karena itu, Kamilov mendorong tim penasihat hukum Febrie Adriansyah untuk mendalami berbagai aspek perkara yang dinilai belum terang. Ia berharap pembuktian di persidangan dapat mengungkap peran masing-masing pihak sehingga pertanggungjawaban pidana tidak dibebankan tanpa pengujian menyeluruh.

"Penting advokat FA mengungkap agenda terselubung ini agar kliennya tidak seorang diri menanggung bebannya," ujarnya.

Pengacara Febrie Pertanyakan Sikap Kejagung

Sorotan serupa sebelumnya disampaikan pihak Febrie melalui kuasa hukumnya, Febri Diansyah. Ia mempertanyakan posisi Ferry yang disebut memiliki peran dominan dalam surat dakwaan,

tetapi hingga kini belum berstatus tersangka.

"Ada satu nama yang disebutkan dalam dakwaan yang disebut dominan, disebut bersama-sama, disebut aktif, tapi Ferry sampai saat ini tidak menjadi tersangka," kata Febri di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Rabu (7/10).

Febrie mempertanyakan konsistensi penanganan perkara apabila seseorang yang disebut dalam dakwaan melakukan tindak pidana secara bersama-sama tidak ditetapkan sebagai tersangka. Ia juga menyoroti perlindungan yang diberikan LPSK kepada Ferry.

"Bersama-sama melakukan kejahatan, kalau konsisten dengan tuduhan itu, artinya semuanya harus jadi tersangka. Mari uji buktinya. Kenapa Ferry Hongkiriwang tidak jadi tersangka?" tegas Febrie.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

242 Ribu Guru PPPK Paruh Waktu akan Diangkat Penuh Waktu mulai Januari 2027

Oleh Redaksi · 11 Okt, 21.02 WIB



BANDA ACEH - Pemerintah berencana mengangkat sebanyak 242.482 guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027.

Pengalihan status tersebut akan dilakukan secara otomatis tanpa melalui proses seleksi.

Selain itu, status kepegawaian mereka juga akan ditata agar menjadi bagian dari pegawai pemerintah pusat.

Sementara itu, pemerintah memastikan guru yang masih berstatus non-ASN tetap memperoleh kesempatan untuk menjalankan tugas mengajar setelah 31 Desember 2026.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah untuk memberikan kepastian status kepegawaian sekaligus menjaga keberlangsungan layanan pendidikan.

"Hal ini bagian dari upaya memberikan kepastian status dan mendukung keberlanjutan layanan pendidikan," kata Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti dalam keterangan tertulis, Minggu (11/10).

Selain pengalihan status PPPK paruh waktu, pemerintah juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS). Kesempatan tersebut diberikan kepada guru yang memenuhi persyaratan administrasi melalui mekanisme seleksi yang direncanakan

nakan berlangsung secara bertahap mulai 2027.

Saat ini, jumlah guru berstatus PPPK tercatat mencapai 935.316 orang. Pemerintah akan melakukan penataan status mereka menjadi pegawai pemerintah pusat secara bertahap dalam rentang waktu 2027 hingga 2029. Proses tersebut menjadi bagian dari agenda penataan kepegawaian di sektor pendidikan.

Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan rekrutmen calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik yang diperkirakan mencapai 464.856 orang. Rekrutmen guru CPNS akan dilaksanakan secara bertahap, dengan tahap awal direncanakan dimulai pada 2027 dan penugasan pertama pada 2028.

Dalam mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, pemerintah telah menetapkan pagu alokasi anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) tahun anggaran 2027 sebesar Rp 89,10 triliun. Penetapan anggaran itu berdasarkan surat dari Menteri Keuangan.

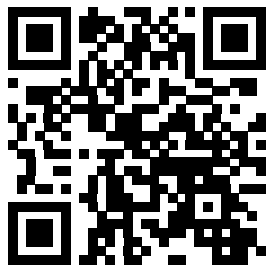
Dari total alokasi tersebut, sekitar Rp23 triliun disiapkan untuk mendukung pembayaran gaji dan tunjangan guru yang beralih status dari PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu.

"Anggaran ini menjadi salah satu komponen pendukung dalam pelaksanaan kebijakan penataan status guru yang direncanakan mulai berjalan pada 2027," ungkap dia

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Isi Percakapan Ruben Onsu dengan Pria Berusia 21 Tahun saat Video Call Terungkap!

Oleh Redaksi · 11 Okt, 10.33 WIB



BANDA ACEH – Isi percakapan Ruben Onsu dengan seorang pria berusia 21 tahun saat melakukan video call menjadi sorotan setelah rekamannya dibagikan Sarwendah di media sosial. Bukan hanya membahas soal kesetiaan, Ruben juga terdengar menawarkan diri untuk menjadi sosok yang mene-

mani pria tersebut. Sarwendah membagikan empat rekaman video yang memperlihatkan mantan suaminya, Ruben Onsu, melakukan panggilan video dengan seorang pria pada Sabtu (10/10/2026). Unggahan itu muncul di tengah polemik antara keduanya yang kembali ramai diperbincangkan.

Lantas, seperti apa isi percakapan Ruben Onsu dengan pria di video call? Simak ulasan selengkap-lengkapnya hanya di artikel ini.

Isi Percakapan Ruben Onsu dengan Pria Usia 21 Tahun saat Video Call

Dalam salah satu rekaman, Ruben Onsu terdengar menawarkan kepada lawan bicaranya untuk menemaninya. Dia bahkan menye-

but istilah penjaga hati dalam percakapan tersebut.

"Eh, kamu temenin aku aja kalau nggak, mau nggak? Jadi penjaga hati mau nggak? Jadi penjaga hati ajalah," ujar Ruben dalam rekaman video call tersebut, dikutip Minggu (11/10/2026).

Potongan percakapan itu kemudian menarik perhatian warganet. Namun, rekaman yang beredar perlu dilihat sesuai konteksnya karena belum seluruh percakapan dijelaskan secara lengkap.

Ruben Onsu Singgung Usia 21 Tahun dan Kesetiaan

Dalam percakapan lainnya, Ruben terdengar menyinggung usia lawan bicaranya yang disebut berumur 21 tahun. Dia kemudian membicarakan soal kesetiaan yang menurutnya semakin sulit ditemukan.

"Ya, sudah 21 tahun pasti sudah tahulah. Yang setia jarang. Yang setia, yang setia mah jarang, maunya macam-macam main gitu," ujar Ruben.

Ruben kemudian mengungkapkan pandangannya mengenai

hubungan dan kesetiaan. Dia mengatakan bukan tipe orang yang suka berganti-ganti pasangan apabila sudah memilih seseorang.

"Sementara aku mah kalau sudah dia, dia aja, maksudnya enggak suka macam-macam gitu orangnya. Enggak tahu orang mah sekarang kayaknya demen, demen sama orang nakal," lanjutnya.

Ruben Dikabarkan Mengajak Tinggal Bersama

Selain pembahasan mengenai penjaga hati dan kesetiaan, muncul pula informasi mengenai ajakan untuk tinggal bersama.

Ya, Ruben dikabarkan beberapa kali menggoda dan mengajak kekasih Artos Olla untuk tinggal bersamanya dalam cuplikan video call yang dibagikan Sarwendah.

Informasi tersebut menjadi bagian lain dari polemik yang berkembang setelah rekaman percakapan itu beredar. Namun, kutipan lengkap mengenai ajakan tinggal bersama belum tersedia dalam materi percakapan yang dapat diverifikasi, sehingga konteks dan redaksi persis ucapan tersebut

perlu diperiksa dari rekaman utuhnya.

Rekaman Video Call Diungkap Sarwendah

Sarwendah mengunggah rekaman tersebut bersamaan dengan keterangannya mengenai pertemuan yang melibatkan sejumlah orang, termasuk seseorang bernama Artos dan pengacara Jaenudin.

Dalam penjelasannya, Sarwendah menyebut pertemuan itu berasal dari undangan Ibu Z. Menurut keterangan Sarwendah, pertemuan tersebut berkaitan dengan persoalan harta gono-gini rumah yang disebut akan dilelang.

Sarwendah juga mengatakan bahwa dirinya mendapat informasi mengenai adanya bukti yang dinilai dapat membantu proses perkara di pengadilan. Dalam pertemuan tersebut, dia mengaku diperlihatkan rekaman video call antara Ruben dan seorang pria yang disebut sebagai kekasih Artos.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Diguncang 2 Gempa Dahsyat M7,7 dan 6,6, Panama Umumkan Keadaan Darurat

Oleh Redaksi · 11 Okt, 10.27 WIB



BANDA ACEH - Pemerintah Panama memberlakukan keadaan darurat nasional, Sabtu (10/10/2026), sehari setelah negaranya diguncang dua gempa dahsyat, masing-masing bermagnitudo 7,7 dan 6,6. Gempa tersebut memicu peringatan tsunami, namun dicabut beberapa jam kemudian.

Menteri di Istana Kepresidenan Juan Carlos Orillac mengumumkan keadaan darurat tersebut dalam konferensi pers di Panama City. Dia mengatakan rumah-rumah, sekolah, fasilitas kesehatan, jalan raya, hingga hotel termasuk di antara fasilitas yang rusak.

Panama masih diguncang gempa susulan hingga Sabtu selama beberapa jam. Seismolog mencatat lebih dari 100 gempa susulan, termasuk berkekuatan 5,8, 5,5, dan 5,2, mengguncang setelah gempa utama.

Sejauh ini tak ada laporan korban jiwa akibat gempa tersebut, namun ratusan rumah di seluruh atau 10 provinsi hancur dan rusak.

Gempa pada Jumat meruntuhkan bangunan di sekitar titik pusat gempa serta memicu evakuasi di seluruh negara Amerika Tengah tersebut.

Badan Survei Geologi Amerika Serikat (USGS) mengungkapkan gempa M7,7, yang juga dirasakan

hingga Kolombia, bertitik pusat sekitar 10 km barat daya Pitaloza Arriba, Provinsi Herrera, dengan kedalaman 10 km.

Malitzie Rivera, wakil direktur Sistem Perlindungan Sipil Nasional, mengatakan sebanyak 27 orang luka di Herrera, mulai dari ringan hingga sedang.

Sebagian besar kerusakan lainnya terkonsentrasi di provinsi-provinsi bagian tengah seperti Veraguas, Herrera, Cocle, dan Los Santos.

Badan Perlindungan Sipil Panama mencatat, sekitar 420 rumah dan sejumlah sekolah rusak. Selain itu tujuh hotel, 13 gereja, dan sembilan jembatan terkena dampak.

Di La Villa de Los Santos, komunitas era kolonial sekitar 64 km dari pusat gempa, rumah-rumah dan satu gereja Katolik runtuh. Gereja San Atanasio yang runtuh dinyatakan sebagai Situs Warisan Sejarah Nasional pada 1938.

Sementara itu video bangunan yang runtuh dan retakan jalan yang dalam menambah kekhawatiran warga.

Para pejabat belum melaporkan adanya orang hilang hingga Sabtu, namun beberapa komunitas masih terisolasi karena tanah longsor dan kerusakan jalan

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

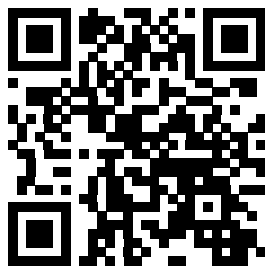
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

HNW Minta DPR Kaji Putusan MK Terkait Ijazah Gibran

Oleh Redaksi · 11 Okt, 10.44 WIB



BANDA ACEH — Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta DPR RI serius mengkaji implikasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Menurut HNW, putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut perlu dilihat dari perspektif konstitusi, khususnya terkait persyaratan seseorang untuk menduduki jabatan wakil presiden. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti sebagai perdebatan Politik, tetapi harus ditempatkan dalam kerangka mekanisme ketatanegaraan.

HNW menyebut DPR dapat mengkaji persoalan tersebut berdasarkan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 yang mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden.

“Karena putusan MK yang bersifat final dan mengikat itu sudah dibacakan dan menjadi perhatian publik, penting bagi lembaga-lembaga negara berwenang seperti DPR untuk mengkaji secara serius

implikasi konstitusional dari putusan ini,” ujar HNW di Jakarta.

HNW menyoroti pertimbangan MK yang, menurut sumber tersebut, menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah Gibran yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SLTA atau sederajat.

Dalam putusannya, MK disebut menyerahkan penanganan lebih lanjut persoalan tersebut kepada lembaga lain yang memiliki kewenangan sesuai konstitusi. Karena itu, HNW meminta seluruh pihak mencermati konsekuensi hukum putusan tersebut, terutama terhadap persyaratan jabatan wakil presiden.

HNW menegaskan, apabila persoalan tersebut nantinya masuk ke ranah pemberhentian wakil presiden, prosesnya tidak bisa dilakukan secara serampangan. Konstitusi telah menetapkan tahapan yang harus dilalui.

Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa presiden dan/atau wakil presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila

terbukti melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Pemberhentian juga dimungkinkan apabila keduanya terbukti tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

“Tentu perlu dikaji dan ditindaklanjuti secara konstitusional, terutama oleh lembaga negara yang secara konstitusional diberi kewenangan,” kata HNW.

Pemakzulan Tak Bisa Langsung Diputuskan MPR

HNW juga menegaskan bahwa munculnya isu pemakzulan tidak berarti Gibran dapat langsung diberhentikan oleh MPR.

Menurut dia, mekanisme pemberhentian presiden atau wakil presiden harus dimulai dari DPR. DPR terlebih dahulu menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran atau persoalan tidak terpenuhinya persyaratan jabatan.

Selanjutnya, dugaan tersebut harus diperiksa oleh MK. Apabila MK menyatakan dugaan tersebut terbukti sesuai ketentuan konstitusi, proses dilanjutkan melalui

DPR sebelum akhirnya dibawa ke MPR untuk mendapatkan keputusan akhir.

Dengan demikian, isu pemakzulan Gibran tidak bisa diputuskan hanya berdasarkan tekanan politik ataupun perdebatan publik. Ada rangkaian prosedur konstitusional yang wajib dipenuhi, termasuk ketentuan mengenai kuorum dan dukungan suara di DPR maupun persyaratan pengambilan keputusan di MPR.

“MPR berada pada tahap akhir proses tersebut, setelah melalui DPR dan pemeriksaan di MK,” jelas HNW.

HNW meminta persoalan tersebut ditangani secara proporsional agar putusan MK tidak berkembang menjadi spekulasi politik yang justru memperbesar ketidakpastian pemerintahan.

Menurutnya, lembaga negara yang memiliki kewenangan harus menjalankan tugas berdasarkan koridor konstitusi.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

NASIONAL

Merespons Usul Pemakzulan Gibran, Kepala Bakom: Jangan di Luar Jalur Hukum

Oleh Redaksi · 11 Okt, 08.33 WIB



BANDA ACEH - Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI Syahganda Nainggolan menegaskan jika ada pihak yang mengusulkan pemakzulan terhadap Gibran, langkah tersebut diharapkan tidak keluar dari jalur hukum.

“Yang kita memang melihat ini kalau memang ada instabilitas yang diciptakan oleh ketidakpuasan, ya itu jangan di luar jalur-jalur hukum,” ujar Syahganda di Jakarta, Sabtu (10/10).

Karena, semua pihak harus menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal tidak ditemukan ijazah SMA sederajat Rakabuming Raka. Menurutnya, keputusan tersebut menegaskan bahwa Gibran tidak bisa didiskualifikasi sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pilpres 2024.

Syahganda tak memungkiri, putusan MK tersebut memunculkan penafsiran lain, khususnya soal tidak adanya ijazah SMA sederajat milik Gibran.

“Nah terkait tadi kemana alurnya, ini kan kita masih melihat kan, itu alurnya kalau bisa ke Politik, bisa ke kemudian ke hukum lainnya dan lain-lain,” ujarnya.

Tapi yang pasti Gibran telah dilantik menjadi Wakil Presiden (Wapres) RI. Sehingga kewenangan tersebut menjadi ranah lembaga lain.

“Ya yang paling penting kan kita menghormati, sebagai eksekutif menghormati yudikatif. Dan itu kekuasaan yudikatif sudah jelas bahwa tidak bisa di-impeach. Ya kan dari pasangan Bapak Presiden maupun Bapak Wakil Presiden,” katanya

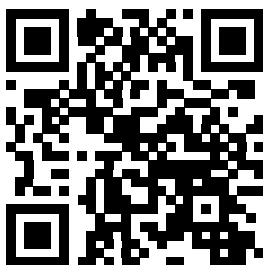
Ia lantas mencontohkan tindakan Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Fraksi PDI Perjuangan Rojab Asy'ari yang menurunkan foto Wapres Gibran Rakabuming Raka dari ruang kerjanya. Syahganda menegaskan, secara konstitusi Gibran masih menjabat sebagai Wapres RI.

“Seperti tadi misalkan penurunan foto, ya itu kan kurang baiklah ya, karena kan beliau bagaimanapun masih tetap sebagai wakil presiden gitu. Karena dia kan, kalau yang nurunin foto misalkan tukang becak di pinggir jalan sih enggak ada masalah, ya kan. Tapi kalau anggota DPRD kan dia kan makan dari gaji negara, itu aja,” pungkasnya

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

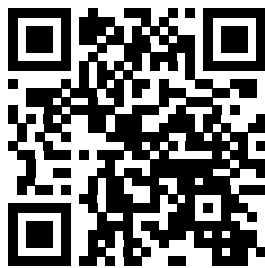
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Prof Henry Indraguna: Pemakzulan Gibran Tak Bisa Berdasar Opini

Oleh Redaksi · 11 Okt, 16.41 WIB



BANDA ACEH -Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tidak dapat ditafsirkan sebagai pernyataan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lulus SMA.

Demikian penegasan Guru Besar Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang, Prof Henry Indraguna, dikutip Minggu 11 Oktober 2026.

Prof Henry menilai kesimpulan tersebut keliru karena mengabaikan perbedaan antara pertimbangan hukum dan amar putusan.

Menurutnya, Majelis Hakim Konstitusi menyatakan permohonan tidak dapat diterima, dan bukan membatalkan pencalonan atau mendiskualifikasi Gibran sebagai Wakil Presiden Terpilih bersama Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

“Dalam putusannya 9 Hakim Konstitusi bulat menyatakan permohonan tidak dapat diterima. MK tidak membatalkan apa pun, tidak mendiskualifikasi siapa pun, dan tidak menyatakan siapa pun bersalah,” kata Prof Henry.

Doktor Ilmu Hukum UNS Surakarta dan Universitas Borobudur Jakarta ini menjelaskan, kewenangan MK dalam perselisihan hasil pemilihan umum sejatinya dibatasi konstitusi dan undang-undang.

Karena itu, lanjut dia, perkara perselisihan hasil pemilu tidak dapat serta-merta diperlakukan sebagai pemeriksaan menyeluruh atas riwayat pendidikan seseorang.

Terkait catatan MK mengenai tidak ditemukannya bukti meyakinkan berupa ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri sebagai dasar penyetaraan pendidikan Gibran, Prof Henry menegaskan

bahwa tidak ditemukannya bukti dalam suatu perkara tidak otomatis membuktikan seseorang tidak pernah lulus SMA.

Hal ini merujuk pada surat keterangan penyetaraan yang digunakan Gibran saat pencalonan.

Dalam pandangan Prof Henry, keputusan administrasi negara pada prinsipnya dianggap sah selama belum dicabut atau dibatalkan oleh lembaga yang berwenang.

“Kalau ada kekurangan dalam verifikasi, itu wilayah penyelenggara pemilu bukan kesalahan peserta atau kontestan,” kata Tenaga Ahli DPR itu.

Prof Henry yang juga Dewan Pengawas Badan Advokasi Hukum dan HAM DPP Partai Golkar itu mengapresiasi sikap Gibran yang menyatakan meng-

hormati proses hukum dan siap menindaklanjuti catatan MK.

Ketua Badan Hukum Advokasi dan HAM DPP Ormas MKGR ini meminta publik tidak menjadikan pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Konstitusi sebagai vonis di luar proses hukum karena hal ini sejatinya adalah penghakiman sepihak yang merugikan harkat dan martabat serta masa depan Gibran yang juga memiliki kesamaan hak sebagai Warga Negara Indonesia yang dilindungi konstitusi.

“Selama tidak ada putusan yang menyatakan sebaliknya, Wakil Presiden Gibran adalah pejabat yang sah. Negara hukum tidak boleh berubah menjadi negara opini,” kata Prof Henry

NASIONAL

Putusan MK Bikin Gibran Makin Diolok-olok

Oleh Redaksi · 11 Okt, 08.16 WIB



BANDA ACEH -Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka membawa dampak negatif bagi citra Politik putra Presiden ke-7 RI Joko Widodo tersebut.

Pengamat Politik Adi Prayitno menilai, pasalnya, meski MK tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden, putusan tersebut memicu kritik hingga desakan terbuka agar Gibran mengundurkan diri.

“Gibran diolok-olok, dikritik, bahkan secara terbuka diminta mengundurkan diri,” kata Adi lewat kanal Youtube miliknya, Minggu, 11 Oktober 2026.

Menurut Adi, kelanjutan persoalan ini sangat bergantung pada sikap DPR RI. Lembaga legislatif tersebut dinilai memiliki ruang politik untuk menindaklanjuti polemik putusan MK melalui mekanisme yang tersedia.

“Nasib Gibran di masa mendatang di tangan DPR. Kalau DPR berkehendak, barang itu pun selesai. Ada pansus, Hak Angket, saya yakin, merem saja selesai Gibran,” ujarnya.

Sebaliknya, Adi menilai polemik tersebut tidak akan berkembang menjadi gerakan politik yang

lebih besar apabila DPR tidak mengambil langkah lanjutan.

“Tapi jika tidak ada follow up di DPR, maka tidak akan ada gerakan apa-apa,” katanya.

Adi juga menyoroti posisi Gibran yang dinilainya tidak menjadi bagian dari kader partai politik mana pun. Kondisi tersebut menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam membaca dinamika politik yang berpotensi memengaruhi masa depan Gibran.

Sebelumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan minimal SLTA atau sederajat.

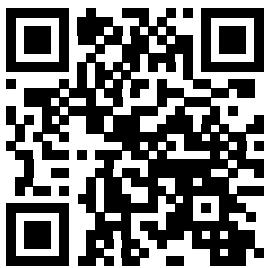
Meski demikian, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena persoalan kedudukan hukum. Putusan tersebut tidak mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

Dengan demikian, meski tidak mengubah status jabatan Gibran, putusan MK tersebut tetap memunculkan polemik politik yang perkembangannya turut bergantung pada respons DPR RI

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

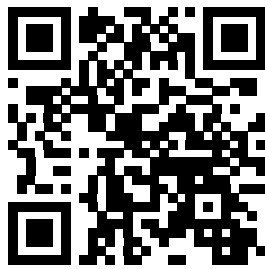
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Siaga 98 Desak DPR Kaji Putusan MK Terkait Gibran

Oleh Redaksi · 11 Okt, 10.21 WIB



Koordinator Siaga 98, Hasanuddin. FOTO/Net.

BANDA ACEH - Simpul Aktivis Gerakan 98 (Siaga 98) mendorong Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mencermati dan mengkaji pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai persyaratan pendidikan Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka yang tertuang pada halaman 376 putusan MK.

Koordinator Siaga 98, Hasanuddin, berpandangan bahwa pertimbangan tersebut perlu menjadi bahan kajian melalui mekanisme kelembagaan yang sah, dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antarlembaga negara serta ketentuan hukum dan konstitusi.

"DPR RI perlu menjadi salah satu pihak yang mencermati substansi pertimbangan Mahkamah, dengan tetap memperhatikan pembagian kewenangan antarlembaga negara serta mekanisme hukum dan ketatanegaraan yang berlaku," kata Hasanuddin kepada RMOL, Minggu, 11 Oktober 2026.

Dalam pertimbangan yang disoroti tersebut, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau

mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dari posisinya sebagai Wakil Presiden. Namun, Mahkamah juga menguraikan persoalan mengenai dokumen pendidikan dari luar negeri yang dijadikan dasar untuk disetarakan dengan persyaratan pendidikan paling rendah tamat SMA, MA, SMK, MAK, atau sekolah lain yang sederajat.

Siaga 98 menilai, substansi pertimbangan MK tersebut perlu dicermati secara serius agar persoalan pemenuhan persyaratan pencalonan presiden dan wakil presiden memperoleh kejelasan berdasarkan mekanisme hukum yang tepat.

"Pertimbangan MK sebagai mana tercantum pada halaman 376 tersebut, menurut Siaga 98, patut dicermati secara serius agar persoalan mengenai pemenuhan persyaratan pejabat publik memperoleh kejelasan melalui mekanisme yang tepat," tegas Hasanuddin.

Menurut Hasanuddin, DPR dapat menjadi ruang penyaluran aspirasi masyarakat apabila terda-

pat permintaan agar persoalan tersebut ditindaklanjuti. Proses pengkajian dapat berawal dari inisiatif anggota DPR maupun fraksi-fraksi, baik berdasarkan permohonan masyarakat maupun atas inisiatif sendiri.

Meski demikian, Hasanuddin menegaskan bahwa aspirasi masyarakat tidak serta-merta menjadi keputusan kelembagaan DPR. Setiap langkah harus mengikuti tata tertib DPR, ketentuan perundang-undangan, serta batas kewenangan konstitusional yang berlaku.

"Dengan demikian, aspirasi masyarakat tidak serta-merta menjadi keputusan kelembagaan, tetapi dapat menjadi bahan pertimbangan bagi anggota DPR atau fraksi-fraksi untuk menelaah persoalan tersebut secara objektif dan bertanggung jawab," terang Hasanuddin.

Lebih lanjut, Hasanuddin menekankan pentingnya menempatkan persoalan tersebut dalam kerangka negara hukum, kepastian hukum,

transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan negara.

Hasanuddin mendorong DPR dan pihak-pihak terkait mengkaji substansi persoalan berdasarkan fakta, dokumen, serta ketentuan hukum yang berlaku. Pengkajian tersebut juga harus menghormati kewenangan lembaga negara lainnya.

"Setiap tindak lanjut harus dilakukan secara konstitusional, tanpa mengabaikan prinsip kepastian hukum maupun kewenangan lembaga negara lainnya," tegas Hasanuddin.

Bagi Siaga 98, persoalan ini bukan semata-mata mengenai jabatan seseorang, melainkan juga menyangkut konsistensi penerapan persyaratan pencalonan, penghormatan terhadap konstitusi, serta akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara.

"Siaga 98 mendorong DPR dan pihak-pihak terkait untuk mengkaji substansi persoalan berdasarkan fakta, dokumen, dan ketentuan hukum yang berlaku," pungkas Hasanuddin.

NASIONAL

Jokowi Mulai Ragu soal Prabowo-Gibran Dua Periode

Oleh Redaksi · 11 Okt, 06.10 WIB



BANDA ACEH -Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan permohonan sengketa syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dapat diterima, namun MK mencatat tidak menemukan bukti meyakinkan terkait kepemilikan ijazah SMA atau setara, membuat Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mulai ragu soal masa depan Politik anak sulungnya.

Demikian pandangan Direktur ABC Riset & Consulting, Erizal, dikutip Minggu 11 Oktober 2026.

Buktinya, kata Erizal, saat ditanya wartawan peluang Prabowo-Gibran dua periode setelah putusan MK Nomor 1/2026, Jokowi tidak lagi bersemangat menjawab seperti tahun lalu, kendati tidak mengatakan pupus atau sudah berakhir.

"Jawaban Jokowi adalah raut wajahnya yang tak lagi penuh senyum seperti dulu," kata Erizal.

Erizal menilai Jokowi salah baca terhadap Prabowo. Prabowo sebagai bawahan berbeda jauh dengan Prabowo sebagai komandan.

"Dua posisi itu pernah dialami Prabowo pada saat yang bersamaan. Sementara Jokowi tidak. Jokowi merasa Prabowo adalah anak buahnya selamanya, kendati

ia bukan lagi Presiden," kata Erizal.

Menurut Erizal, apa yang dikatakan Jokowi pada saat menjadi Presiden, pasti akan diamini Prabowo semuanya, tanpa membantah sedikitpun. Bahkan karpet merah untuk jalan Jokowi pun tidak akan diinjak Prabowo, karena dia tahu itu bukanlah untuk dirinya.

"Itu bukti kepatuhan, etika, sopan santun, seorang Prabowo," kata Erizal.

Tapi, saat Jokowi tidak lagi menjadi Presiden, karpet merah untuk Prabowo tidak bisa diinjak seenaknya pula oleh Jokowi. Ini yang sepertinya, Jokowi lupa.

"Prabowo itu tidak kosong. Ia punya cita-cita, punya keinginan, ideologi, yang bisa jadi justru berbeda jauh dengan Jokowi, kendati tema awalnya adalah keberlanjutan," kata Erizal.

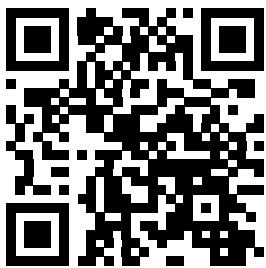
Seharusnya, sejak awal, Jokowi ikut Prabowo saja. Tidak sebaliknya, Prabowo yang ikut Jokowi seperti sejak awal mematok Prabowo-Gibran dua periode.

"Apalagi terus mematut-matut diri seperti dikatakan loyalisnya, bahwa Prabowo tak ada apa-apanya, tanpa Jokowi. Prabowo menjadi Presiden karena Jokowi," kata Erizal.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

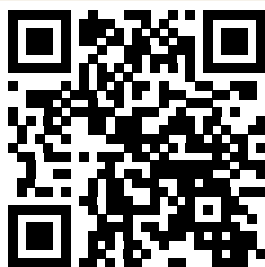
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Forum Komunikasi Diaspora Indonesia Tuntut Gibran Minta Maaf dan Mundur

Oleh Redaksi · 11 Okt, 06.06 WIB



BANDA ACEH -Tensi Politik Tanah Air makin memanas buntut penegasan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang setara dengan tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.

Menyikapi hal tersebut, Forum Komunikasi Diaspora Indonesia (FKDI) menyampaikan surat bertitelkan Aspirasi FKDI terkait pengunduran diri Wapres Gibran Rakabuming Raka sebagai tindak lanjut dari putusan MK. Surat bernomor 001/FKDI/X/2026 itu ditujukan kepada Ketua DPR, Ketua MPR, Presiden dan Wakil Presiden.

Surat tersebut, sesuai keterangan tertulis yang diterima RMOL, ditandatangani oleh Ketua FKDI Eko Raharjo dan Sekjen FKDI Agus Yunanto.

“Mendesak Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka untuk meminta maaf

kepada seluruh rakyat Indonesia dan menyatakan pengunduran diri dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Apabila dalam waktu 30 hari Wapres Gibran Rakabuming Raka tidak mengumumkan pengunduran dirinya sebagai Wapres, maka FKDI mendesak pimpinan DPR dan MPR untuk memulai proses pemakzulan terhadap yang bersangkutan,” bunyi surat tersebut, dikutip Minggu 11 Oktober 2026.

Diketahui, pada Selasa 6 Oktober 2026, MK mengeluarkan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di mana dalam persidangan tidak ditemukan atau didapatkan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri, yang dapat dijadikan dasar untuk disetarakan dengan pendidikan paling rendah tamat SMA atau sederajat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Undang-Undang Pemilu.

Menurut FKDI, apa yang dinyatakan oleh MK merupakan suatu dasar legal dan konstitusional yang sangat kuat bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak memenuhi persyaratan, baik sebagai calon Wapres maupun sebagai Wapres yang dilantik dan memangku jabatan sebagai Wapres.

Dalam amar putusannya MK tidak menerima permohonan dis kualifikasi dari pihak pemohon dengan alasan bahwa pemohon tidak mempunyai legal standing karena bukan kontestan pemilu, dan telah melewati batas waktu penuntutan yang ditentukan.

Dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tersebut, MK juga mengindikasikan suatu rekomendasi kepada lembaga yang berwenang untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Sudah barang tentu yang dimaksud oleh MK adalah lembaga DPR dan MPR yang secara konstitusional mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk menindaklanjuti apabila Presiden atau Wapres terbukti melanggar persyaratan-

persyaratan legal dan konstitusional sesuai Pasal 7A UUD NRI Tahun 1945.

Oleh karena itu, dalam aspirasi FKDI Poin 2 -- apabila Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam waktu 30 hari tidak menyatakan pengunduran diri -- maka FKDI mendesak Ketua DPR dan MPR untuk memulai proses pemakzulan terhadap yang bersangkutan (Pasal 7B UUD NRI).

Alasan dari FKDI untuk memprioritaskan agar Wapres Gibran Rakabuming Raka, menyatakan pengunduran diri (aspirasi FKDI Poin 1) adalah karena FKDI menempatkan akhlak dan martabat kebangsaan yang berdasarkan pada falsafah Pancasila sebagai suatu norma tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Di samping itu, pernyataan permintaan maaf dan pengunduran diri dari Wapres Gibran Rakabuming Raka selain akan bisa meringankan sanksi dari kesalahan yang ...

» Selengkapnya di [www.harianaceh.co](http://www.harianaceh.co.id)

NASIONAL

Parpol seperti Kompak Menolak Bela Gibran

Oleh Redaksi · 11 Okt, 06.14 WIB



BANDA ACEH -Sebelum ada Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada Selasa, 6 Oktober 2026, seperti sejumlah partai Politik (parpol) yang mengusung Wapres Gibran Rakabuming Raka, tidak ada yang melakukan pembelaan terhap putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo alias Jokowi itu.

Terlebih saat MK menyatakan tidak mendapatkan bukti kepemilikan ijazah pendidikan Gibran setingkat sekolah menengah atas (SMA) dari tempatnya mengenyam pendidikan di Singapura.

"Tidak ada parpol yang melakukan pembelaan. Bahkan, saat ijazah Jokowi juga digugat, partai-partai juga tidak ada yang membela," kata Direktur ABC Riset & Consulting, Erizal, dikutip Minggu 11 Oktober 2026.

Menurut Erizal, sikap yang diambil parpol-parpol tersebut buah dari sikap Jokowi saat selama 10 tahun berkuasa.

"Hubungan Jokowi dengan partai-partai, terutama pada saat ia

berkuasa, juga tidak baik-baik saja. Jejak Jokowi di partai, buruk," kata Erizal.

Eizal melihat masuknya Bahlil Lahadalia menjadi Ketua Umum Golkar, memang ada restu Jokowi. Tapi Golkar pecah menjadi kubu Aburizal Bakrie dan kubu Agung Laksono, terjadi di era Jokowi.

Konflik PPP kubu Djan Faridz dan Suryadharma Ali juga terjadi di era Jokowi. Bahkan, Demokrat nyaris dibegal juga terjadi di era Jokowi.

Karena itu, lanjut Erizal, kalau sampai putusan MK Nomor 1/2026 itu ditindaklanjuti partai-partai di DPR, maka semua bisa berjalan mulus tanpa penghambat.

"Tak ada yang akan membela Wapres Gibran seperti dulu Wapres Boediono dibela Demokrat saat kasus Century," kata Erizal.

"Tak ada alasan bagi partai-partai di DPR untuk tidak menindaklanjuti putusan MK itu. Ini bisa jadi karma berikutnya yang akan dialami Jokowi," sambungnya

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

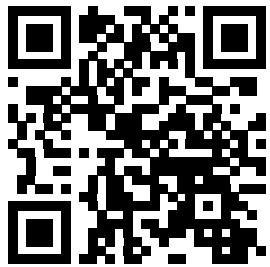
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



NASIONAL

Polemik Ijazah Gibran, Pakar: Pemakzulan Tak Bisa Lewati Konstitusi

Oleh Redaksi · 11 Okt, 10.41 WIB



BANDA ACEH — Pakar hukum tata negara UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, Prof. Sugianto, mengingatkan agar wacana pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak dilakukan dengan mengabaikan mekanisme konstitusional.

Desakan pembentukan panitia khusus (pansus) DPR terkait polemik ijazah SMA atau sederajat Gibran, menurutnya, perlu dicermati dari aspek hukum dan ketatanegaraan.

Sugianto menilai, pembentukan pansus DPR pascaputusan Mahkamah Konstitusi (MK) tidak elok apabila hanya didasarkan pada dalih bahwa ijazah SMA atau sederajat Gibran tidak ditemukan.

"Bukankah Gibran Rakabuming Raka lulus S1? Bila benar, tunjukkan kepada publik. Seseorang yang melanjutkan studi S1 di mana pun pastinya memiliki ijazah SMA atau yang disetarakan," ujar Sugianto kepada

Monitoindonesia.com Minggu (11/10/2026).

Menurutnya, polemik tersebut harus ditempatkan dalam kerangka pembuktian dan mekanisme hukum yang berlaku.

Isu mengenai dokumen pendidikan tidak serta-merta dapat dijadikan dasar untuk mendorong pemberhentian wakil presiden tanpa memenuhi persyaratan konstitusional.

Ia menegaskan, desakan pemakzulan Gibran perlu dikembalikan pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 7A dan Pasal 7B.

Pasal 7A mengatur pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya atas sejumlah alasan konstitusional, di antaranya pelanggaran hukum tertentu, perbuatan tercela, atau apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Sementara itu, Pasal 7B mengatur prosedur pemberhentian tersebut. DPR tidak dapat langsung memberhentikan wakil presiden, melainkan harus terlebih dahulu mengajukan pendapat kepada MK untuk diperiksa dan diputus.

Apabila MK membenarkan pendapat DPR, proses selanjutnya dilakukan melalui mekanisme di MPR sesuai ketentuan konstitusi.

"Untuk impeachment atau pemakzulan jabatan wakil presiden, landasan hukumnya sudah diatur dalam Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI 1945. Tentunya harus melalui pintu DPR, kemudian meminta pendapat MK sebelum proses dilanjutkan ke MPR," kata Sugianto.

Ia juga menyoroti perlunya menempatkan polemik tersebut secara proporsional di tengah desakan publik setelah putusan MK. Menurutnya, persoalan yang diperdebatkan harus dibuktikan melalui mekanisme yang sah,

bukan semata-mata melalui tekanan opini publik.

Dengan demikian, polemik ijazah Gibran dan wacana pemakzulan harus dibedakan sebagai dua persoalan yang berkaitan, tetapi tidak identik.

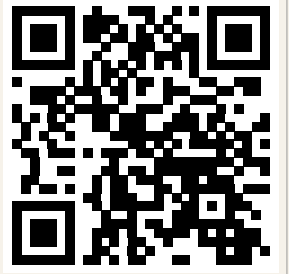
Persoalan pertama, menyangkut pembuktian dokumen pendidikan dan pemenuhan persyaratan pencalonan, sedangkan persoalan kedua menyangkut terpenuhi atau tidaknya alasan konstitusional serta prosedur pemberhentian wakil presiden.

Mekanisme tersebut menjadi penting agar setiap langkah Politik dan hukum terkait jabatan wakil presiden tetap berada dalam koridor konstitusi, sekaligus memberikan ruang bagi pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

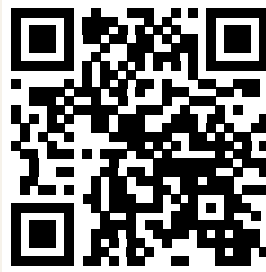
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ACEH

Wali Nanggroe Terima Kunjungan MAPIM, Jajaki Kerja Sama Strategis Aceh–Malaysia

Oleh Redaksi · 11 Okt, 19.41 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH – Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia, Tgk. Malik Mahmud Al Haythar, menerima kunjungan silaturahmi dari delegasi Majelis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia (MAPIM) di Meuligoe Wali Nanggroe Aceh, Jumat sore 9 Oktober 2026.

Rombongan delegasi dipimpin langsung oleh Presiden MAPIM, Tuan Haji Mohd. Azmi bin Abdul Hamid. Ia didampingi oleh sejumlah pengurus MAPIM, perwakilan Kementerian Agama Kamboja, Dr. Hj. Ijob Aitskary. Sementara itu, Wali Nanggroe turut didampingi oleh Staf Khusus, Dr. M. Raviq.

Kabag Kerjasama dan Humas Wali Nanggroe, Zulfikar Idris dalam keterangannya menyampaikan, pertemuan yang berlangsung hangat sejak pukul 17.00 WIB ini

berfokus pada penguatan hubungan bilateral melalui berbagai sektor produktif.

Seusai pertemuan, Presiden MAPIM Mohd. Azmi Abdul Hamid menyampaikan apresiasi yang mendalam atas sambutan hangat yang diberikan oleh lembaga Wali Nanggroe.

“Bismillahirrahmanirrahim. Saya pikir ini adalah satu penghormatan yang tinggi di mana kami diterima untuk berkunjung dan mendengar sendiri cerita, kisah, sejarah, perjuangan. Semuanya itu memberi inspirasi yang tinggi kepada kami,” ujar Mohd. Azmi.

Mohd. Azmi menjelaskan bahwa kunjungan itu bukan sekadar silaturahmi biasa, melainkan sebuah langkah awal untuk membangun kolaborasi nyata. Pihaknya membawa misi untuk membuka keran kerja sama di sektor-sektor

krusial untuk mendukung pembangunan Aceh ke depan.

“Saya telah menyatakan bahwa kunjungan kami adalah menyatakan hasrat untuk ada kerja sama antara Malaysia dengan Aceh dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, ekonomi, pemakanan (pangan), dan sebagainya,” tambahnya.

“Kita mengharapkan suatu perhubungan yang berkelanjutan antara banyak organisasi di Aceh dan juga di Malaysia. Jadi itu yang saya kira pencapaian yang sangat baik, pemulaan yang sangat baik untuk kita mengadakan usaha masa depan Aceh,” pungkas Mohd. Azmi penuh optimisme.

Merespons hasrat baik tersebut, Wali Nanggroe menyambut positif dan menyatakan komitmen penuhnya untuk membuka pintu kolaborasi. Wali Nanggroe menegaskan bahwa hubungan historis dan emo-

sional antara Aceh dan Malaysia harus dimanifestasikan dalam bentuk kerja sama konkrit yang membawa maslahat bagi kedua belah pihak.

“Kami sangat menyambut baik kehadiran dan niat mulia dari delegasi MAPIM. Aceh selalu terbuka untuk kolaborasi strategis, terutama dalam memajukan sektor pendidikan Islam, penguatan ekonomi syariah, dan ketahanan pangan. Kami berharap rencana kerja sama ini segera ditindaklanjuti secara teknis agar manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” tutur Wali Nanggroe.

Wali Nanggroe menambahkan kolaborasi tidak hanya terjadi di tingkat lembaga tinggi, tetapi juga melibatkan berbagai organisasi kemasyarakatan di kedua wilayah.[]

ACEH

Aceh Barat Pecahkan Rekor MURI, 2.026 Orang Ngopi Khop Serentak

Oleh Aceh Barat · 11 Okt, 14.15 WIB



Ribuan peserta mengikuti aksi minum Kopi Khop massal di Lapangan Teuku Umar, Meulaboh, FOTO/Al

MEULABOH – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat sukses mencatatkan rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (MURI) melalui aksi minum Kopi Khop massal yang diikuti 2.026 peserta di Lapangan Teuku Umar, Meulaboh, Minggu (11/10/26).

Para peserta membentuk formasi angka 438 sebagai simbol usia Kota Meulaboh. Aksi pemecahan rekor tersebut disaksikan langsung oleh tim juri MURI dari Jakarta.

Bupati Aceh Barat, Tarmizi, SP, mengatakan jumlah peserta disesuaikan dengan tahun pelaksanaan kegiatan. Menurutnya, pencapaian ini bukan sekadar mengejar rekor, tetapi juga strategi mempromosikan Kopi Khop sebagai ikon kuliner dan pariwisata Aceh Barat ke tingkat nasional hingga internasional.

“Kita ingin memperkenalkan Kopi Khop kepada Indonesia dan dunia, sehingga orang tertarik datang ke Aceh Barat. Dampaknya, perputaran uang meningkat dan UMKM ikut tumbuh,” ujar Tarmizi.

Kopi Khop, minuman khas Aceh Barat yang disajikan menggunakan gelas terbalik, telah ter-

daftar sebagai kekayaan intelektual komunal daerah. Pemkab Aceh Barat juga berencana membangun Tugu Kopi Khop untuk memperkuat identitas kuliner lokal.

Direktur Operasional MURI, Awan Rahargo, mengapresiasi kegiatan tersebut. Ia menilai Kopi Khop memiliki keunikan budaya sekaligus potensi besar sebagai daya tarik wisata.

Menurut Awan, aksi minum Kopi Khop oleh 2.026 peserta memenuhi kriteria MURI sebagai kegiatan minum Kopi Khop dengan peserta terbanyak di Indonesia.

Di sisi lain, Bupati Tarmizi mengimbau ASN agar menikmati kopi di luar jam kerja, kecuali saat istirahat. Masyarakat juga diingatkan untuk membatasi konsumsi kopi dan mengatur waktu berkumpul di warung agar tidak larut malam.

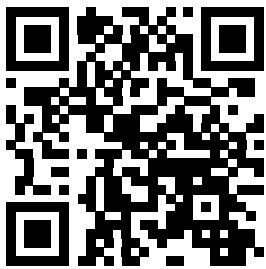
Rekor MURI ini semakin memperkuat posisi Kopi Khop sebagai kebanggaan kuliner Aceh Barat sekaligus peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pariwisata daerah.[]

Editor : Biro Meulaboh.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

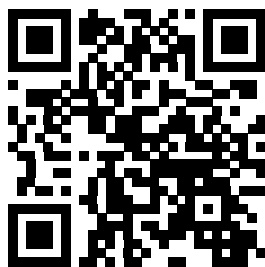
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ACEH

T. Haris Fadhillah Daftar Bakal Calon Ketua PWI Aceh, Usung Transformasi Kepemimpinan

Oleh Redaksi · 11 Okt, 11.27 WIB



BANDA ACEH, BANDA ACEH – T. Haris Fadhillah resmi mendaftarkan diri sebagai bakal calon Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Aceh periode 2026–2031. Ia menyatakan pencalonannya merupakan upaya mengakomodasi aspirasi sejumlah anggota PWI, sekaligus mendorong transformasi kepemimpinan dan penguatan organisasi profesi wartawan di tengah perkembangan teknologi.

Haris mendatangi Sekretariat Panitia Konferensi Provinsi (Konferprov) PWI Aceh di Sabtu (10/10/2026), sekitar pukul 15.00 WIB, untuk mengambil formulir sekaligus menyerahkan berkas pendaftaran.

Kedatangannya disambut Sekretaris Steering Committee (SC) Konferprov PWI Aceh, Iranda Novandi, bersama Ketua Organizing Committee (OC), Nazar Ahadi, dan anggota Pokja Verifikasi Calon, Imran Joni. Proses pendaftaran tersebut turut didampingi tim pemenang, Sadhali dan Muklis Musa.

Haris yang saat ini menjabat Wakil Ketua Bidang Kerja Sama

PWI Aceh mengatakan, keputusannya maju dalam kontestasi tersebut berangkat dari aspirasi sejumlah anggota, terutama mereka yang memberikan dukungan kepadanya pada Konferprov PWI Aceh tahun 2021.

Pada konferensi sebelumnya, Haris memperoleh suara terbanyak kedua. Pengalaman tersebut menjadi salah satu pertimbangan untuk kembali mengikuti proses pemilihan dan memperjuangkan aspirasi anggota yang menginginkan dirinya maju.

“Saya lebih senang menyebutnya sebagai aspirasi, bukan desakan. Ada sejumlah teman yang menyampaikan aspirasi dan mengajak saya kembali maju. Bagi saya, ini hal yang biasa dalam alam demokrasi,” ujar Haris.

Ia menegaskan, kompetisi dalam organisasi harus dijalankan secara dewasa dengan tetap menjaga persaudaraan dan solidaritas. Menurutnya, perbedaan pilihan dalam pemilihan tidak boleh menjadi alasan untuk memecah hubungan antarsesama wartawan.

Haris mengaku telah ditempa melalui berbagai organisasi sejak

Pramuka hingga PWI. Pengalaman tersebut mengajarkannya bahwa setiap kompetisi memiliki konsekuensi kemenangan dan kekalahan, yang harus diterima dengan sikap sportif.

Ia juga menyinggung pengalamannya dalam kontestasi sebelumnya ketika harus menerima kekalahan tipis dari M. Nasir Nurdin. Meski demikian, Haris mengaku tetap mendukung kepemimpinan PWI Aceh setelah kompetisi berakhir.

“Kompetisi tetaplah kompetisi. Namun, setelah kompetisi selesai, kita kembali bersatu untuk membesarkan organisasi. Siapa pun yang terpilih, itulah pilihan bersama yang harus kita hormati,” katanya.

Haris menegaskan, salah satu fokus yang ingin diperjuangkannya apabila mendapat kepercayaan anggota adalah mengembalikan dan meningkatkan peran serta fungsi PWI sebagai organisasi profesi wartawan.

Menurutnya, PWI harus semakin hadir dalam menjawab kebutuhan anggota, terutama melalui peningkatan kapasitas sumber

daya manusia (SDM), penguatan kompetensi jurnalistik, serta upaya meningkatkan kesejahteraan wartawan.

Ia menilai, perubahan lanskap media akibat perkembangan teknologi digital menuntut wartawan untuk terus meningkatkan kemampuan agar tetap profesional, kompetitif, dan mampu menghasilkan karya jurnalistik yang berkualitas.

Sebagai penguji nasional Uji Kompetensi Wartawan (UKW) PWI dan Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW) LPP RRI, Haris memandang pendidikan dan pelatihan kompetensi sebagai salah satu instrumen penting untuk memperkuat profesionalisme wartawan.

“PWI harus kembali memperkuat peran dan fungsinya sebagai organisasi profesi. Peningkatan kapasitas SDM anggota harus menjadi perhatian, termasuk melalui pendidikan dan pelatihan kompetensi agar wartawan mampu menghadapi disrupsi teknologi,” ujarnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

ACEH

HUT Kota Meulaboh Tanpa Band, Utamakan Seni Budaya

Oleh Aceh Barat · 11 Okt, 11.34 WIB



Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM bersama Wakil Bupati Said Fadheil SH membuka rangkaian peringatan HUT ke-438 Kota Meulaboh, FOTO/HAI.

MEULABOH – Bupati Aceh Barat Tarmizi SP, MM, didampingi Wakil Bupati Said Fadheil SH, secara resmi membuka rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-438 Kota Meulaboh, Sabtu (10/10/26) malam.

Pembukaan yang berlangsung di lahan eks BRI, depan Lapangan Teuku Umar, dihadiri perwakilan Pemerintah Provinsi Aceh, sejumlah bupati dan wali kota, anggota DPR, Forkopimda, perwakilan perusahaan swasta dan BUMN, organisasi masyarakat dan kepe-mudaan, serta ribuan warga.

Tarmizi mengatakan, perayaan HUT Meulaboh tahun ini mengusung pendekatan berbeda dengan meniadakan hiburan musik atau band dan menggantinya dengan pertunjukan seni budaya lokal. Kebijakan tersebut, kata dia, merupakan tindak lanjut dari saran ulama dan organisasi masyarakat Islam di Aceh Barat.

“Pada perayaan kali ini, kami fokus pada talenta lokal dan seni budaya, seperti tari Ratoeh Jaroe, Tarek Pukat, Seudati, Rapai Saman, Rapai Tuha, hingga pertunjukan debus,” ujar Tarmizi.

Dalam kesempatan itu, Tarmizi juga memaparkan tantangan yang dihadapi pemerintahannya bersama Said Fadheil selama sekitar 20 bulan memimpin Aceh Barat. Mulai dari ketidakpastian situasi global, tekanan fiskal dan keterbatasan anggaran hingga bencana alam.

Menurutnya, berbagai tantangan tersebut dapat dihadapi melalui kerja sama antara pemerintah daerah, Forkopimda, organisasi perangkat daerah (OPD), dan unsur terkait lainnya.

“Dengan bersatu dan berkolaborasi, daerah akan lebih maju. Melalui strategi pentahelix yang melibatkan akademisi, pelaku usaha, komunitas masyarakat, pemerintah, dan media, persoalan dapat dipetakan, akar masalah

dipelajari, dan solusi ditemukan,” katanya.

Di tengah keterbatasan anggaran, Tarmizi menegaskan pemerintah daerah memprioritaskan pelayanan dasar, khususnya kesehatan dan pendidikan.

Pada sektor kesehatan, Pemkab Aceh Barat berfokus membenahi RSUD Cut Nyak Dhien (CND), mulai dari manajemen, peningkatan kualitas pelayanan, fasilitas hingga kenyamanan pasien.

Selain itu, pemerintah daerah menjalankan program Kartu Aceh Barat Sehat (KABS) yang memberikan bantuan Rp1 juta bagi pasien yang dirujuk dari RSUD CND ke luar daerah, khususnya Banda Aceh. Bantuan tersebut, kata Tarmizi, diberikan secara langsung tanpa persyaratan yang berbelit-belit.

“Sejak dilantik pada awal Maret 2025 hingga September 2026, program ini telah membantu 1.734 pasien,” ungkapnya.

Di bidang pendidikan, pemerintah daerah tengah membenahi manajemen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk membentangkan praktik pungutan liar (pungli).

Tarmizi juga menyampaikan rencana penugasan guru-guru dayah ke seluruh sekolah tingkat SD dan SMP pada 2027. Mereka akan difokuskan mengajarkan fardhu ain agar siswa memahami dasar-dasar kewajiban dalam agama.

Selain itu, setiap guru dan siswa diwajibkan mengaji selama 15 menit sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai. Guru juga diminta menanamkan nilai-nilai adab kepada siswa sebagai bagian penting dari pendidikan karakter.

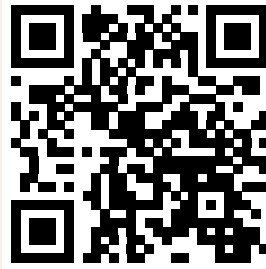
Tarmizi berharap kolaborasi seluruh elemen masyarakat dapat terus diperkuat untuk mendukung pembangunan Aceh Barat dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.[]

Editor : Biro Meulaboh.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



INTERNASIONAL

4 BERITA

INTERNASIONAL

Kondisi Terkini Bandara Riyadh Arab Saudi usai Diserang Houthi, Semua Penerbangan Dibatalkan?

Oleh Redaksi · 11 Okt, 12.05 WIB



BANDA ACEH - Kondisi Bandara Internasional King Khalid di Riyadh, Arab Saudi, menjadi perhatian wisatawan setelah kembali terdampak serangan pada Sabtu (10/10/2026). Insiden ini mengganggu operasional penerbangan dan membuat penumpang perlu memeriksa kembali jadwal perjalanan sebelum berangkat.

Otoritas Umum Penerbangan Sipil Arab Saudi (GACA) melaporkan serangan tersebut menewaskan 12 orang dan menyebabkan 309 lainnya terluka. Sejumlah korban dilaporkan mengalami luka serius dan mendapatkan perawatan di rumah sakit.

Serangan yang dikaitkan dengan kelompok Houthi dari Yaman itu juga memicu penghentian sementara operasional bandara untuk pemeriksaan kerusakan dan keamanan fasilitas. Situasi ini menjadi perhatian bagi wisatawan yang hendak menuju Riyadh, meninggalkan kota tersebut, maupun melakukan transit melalui ibu kota Arab Saudi itu.

Hingga Minggu (11/10/2026) pukul 10.42 WIB, status pembukaan kembali bandara secara penuh masih perlu dikonfirmasi

melalui informasi resmi otoritas setempat. Karena itu, penumpang sebaiknya tidak berasumsi bahwa jadwal penerbangan tetap berjalan normal.

Operasional Bandara Riyadh Sempat Dihentikan

Bandara Internasional King Khalid menjadi sasaran serangan pada Sabtu sore waktu setempat. GACA kemudian menghentikan sementara operasional penerbangan untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap kondisi fasilitas dan memastikan keamanan sebelum kegiatan penerbangan dilanjutkan.

Langkah tersebut berkaitan langsung dengan keselamatan penumpang, awak pesawat, pekerja bandara, dan pengguna fasilitas penerbangan lainnya.

Namun, penghentian operasional sementara tidak serta-merta memastikan bahwa seluruh layanan bandara masih ditutup pada Minggu. Informasi mengenai pembukaan kembali dan jadwal penerbangan perlu mengikuti pengumuman terbaru dari pengelola bandara serta maskapai.

Bagi wisatawan yang sudah memesan tiket ke Riyadh, infor-

masi tersebut penting untuk menentukan waktu keberangkatan menuju bandara, mengatur perjalanan darat, serta mengantisipasi perubahan jadwal.

Penerbangan Dibatalkan dan Dialihkan

Gangguan operasional Bandara Riyadh berdampak pada perjalanan udara. Sejumlah penerbangan dilaporkan dibatalkan atau dialihkan ke bandara lain setelah serangan tersebut.

Laporan Financial Times dalam bahan pemberitaan awal menyebutkan sebanyak 141 penerbangan dibatalkan atau dialihkan. Sementara itu, laporan lain menyebutkan jumlah pembatalan mencapai lebih dari 200 penerbangan.

Perbedaan angka tersebut perlu dicermati karena dapat berasal dari waktu pembaruan, periode penghitungan, atau cakupan penerbangan yang berbeda. Oleh karena itu, jumlah penerbangan terdampak belum dapat dipastikan sebagai angka final dalam pembaruan berita ini.

Gangguan tersebut berpotensi memengaruhi wisatawan yang menjadikan Riyadh sebagai tujuan akhir maupun titik transit menuju

kota lain. Perubahan jadwal penerbangan pertama juga dapat berdampak pada penerbangan lanjutan, terutama bagi penumpang yang memiliki waktu transit terbatas.

Penumpang disarankan memeriksa status penerbangan melalui situs atau aplikasi resmi maskapai. Jika terjadi pembatalan atau pengalihan, hubungi maskapai mengenai penjadwalan ulang, perubahan rute, atau ketentuan pengembalian dana sesuai kebijakan yang berlaku.

Bandara Riyadh Sebelumnya Juga Diserang

Insiden pada Sabtu bukan gangguan keamanan pertama yang dilaporkan terjadi di Bandara Internasional King Khalid dalam pekan tersebut.

Pada Kamis (8/10/2026), bandara yang sama dilaporkan mengalami serangan yang menewaskan tiga warga Arab Saudi dan melukai sejumlah orang lainnya.

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

INTERNASIONAL

Makin Brutal! Houthi Terus Gempur Bandara King Khalid Saudi, 12 Orang Tewas

Oleh Redaksi · 11 Okt, 12.01 WIB



BANDA ACEH - Serangan Houthi ke Bandara Internasional King Khalid, Riyadh, Arab Saudi, Sabtu (10/10/2026), menewaskan 12 orang. Selain itu 309 orang lainnya menderita luka.

Otoritas Penerbangan Sipil Umum Arab Saudi (GACA), Minggu (11/10/2026), menyatakan korban tewas termasuk empat warga Saudi, dua warga Bangladesh, serta masing-masing satu warga negara Amerika Serikat, Mesir, Yordania, Suriah, Palestina, dan Sudan.

Menurut GACA, dari 309 korban luka, beberapa di antaranya dalam kondisi kritis. Seluruh

korban mendapat perawatan medis di rumah sakit.

Serangan Houthi juga menyebabkan kerusakan properti, namun penilaian pasti masih menunggu penyelidikan.

Akibat serangan pada Sabtu sore tersebut, Bandara King Khalid ditutup sementara untuk evakuasi korban dan pemeriksaan kerusakan dan keamanan fasilitas bandara.

Serangan terbaru ini terjadi hanya 2 hari setelah tiga warga Saudi tewas dan beberapa lainnya luka dalam dua serangan terpisah pada Kamis

INTERNASIONAL

Serangan Houthi Tewaskan 3 Orang dan Hancurkan 3 Pesawat, Arab Saudi Balas Gempur Yaman

Oleh Redaksi · 11 Okt, 08.20 WIB



BANDA ACEH - Militer Arab Saudi meluncurkan serangan besar-besaran ke wilayah Yaman yang dikuasai kelompok Houthi, Sabtu (10/10/2026). Serangan tersebut sebagai pembalasan atas gempuran Houthi terhadap bandara di Riyadh yang menewaskan tiga warga Saudi, termasuk seorang pilot, pada Kamis lalu.

Dua sumber pejabat Saudi mengatakan, serangan kelompok yang didukung Iran itu juga merusak tiga pesawat.

Setelah itu serangan Houthi kembali berlanjut pada Jumat (9/10/2026) malam waktu setempat, memicu penghentian penerbangan.

Situs web pelacakan penerbangan Flightradar24,, melaporkan

banyak penerbangan menuju bandara Riyadh yang dialihkan.

Sementara itu koalisi pimpinan Arab Saudi untuk perang melawan Houthi menyatakan telah menghancurkan lebih dari 100 target militer dalam operasi militer berskala besar ke Yaman.

"Kami melaksanakan operasi berskala besar menargetkan personel dan kemampuan militer Houthi," kata juru bicara koalisi, Turki Al Maliki, di media sosial X.

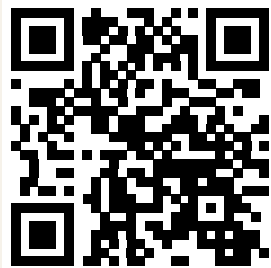
Dia menambahkan pasukannya menghancurkan 136 target militer di wilayah-wilayah yang dikuasai Houthi.

Stasiun televisi milik Houthi Almasirah melaporkan rudal-rudal dari Saudi menargetkan sejumlah wilayah di Provinsi Saada, Yaman.

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

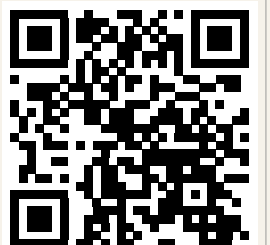
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



INTERNASIONAL

Gawat! Donald Trump Mungkin Perintahkan Serang Iran Lagi

Oleh Redaksi · 11 Okt, 08.24 WIB



BANDA ACEH - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menegaskan militernya mungkin akan menggelar kembali operasi militer terhadap Iran. Dia juga menyebut Iran sebagai negara gagal atau nyaris hancur.

Komentar itu disampaikan Trump saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan operasi militer terbaru terhadap Iran menjelang pemilu paruh waktu AS pada 3 November.

"Mungkin (operasi militer), kita lihat saja nanti," ujarnya, seperti dikutip dari Anadolu, Minggu (11/10/2026).

Dia lalu mengulangi pernyataannya bahwa Iran kini sudah menjadi negara gagal, hancur lebur dari sisi militer dan ekonomi.

"Negara mereka gagal total. Militer mereka kalah. Mereka tidak punya angkatan laut, tidak punya angkatan udara. Mereka mengalami inflasi 300 persen, dan Iran dalam kondisi sangat buruk," katanya.

Namun dia tidak menjelaskan langkah-langkah apa yang bisa dilakukan pemerintahannya atau kapan akan menyerang Iran kembali.

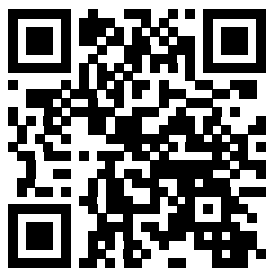
AS dan Israel melancarkan serangan gabungan terhadap Iran pada 28 Februari. Seranga itu mendorong Iran untuk membalas dengan meluncurkan rudal dan drone ke Israel serta pangkalan-pangkalan militer AS di Timur Tengah. Iran juga menutup Selat Hormuz untuk lalu lintas kapal, memicu lonjakan harga minyak global.

Hingga kini belum ada tanda-tanda perang berakhir, bahkan meluas hingga Laut Merah. Babak baru dari perang AS-Israel melawan Iran adalah konflik antara kelompok Houthi yang didukung Iran melawan koalisi Arab Saudi

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



LINGKUNGAN

3 BERITA

LINGKUNGAN

Banjir Bandang Kembali Menerjang Nepal, Rumah dan Jembatan Hanyut di Gorkha

Oleh Redaksi · 11 Okt, 21.12 WIB



BANDA ACEH -- Banjir bandang kembali menerjang Nepal. Kali ini, banjir melanda Distrik Gorkha di wilayah tengah negara tersebut pada Minggu (11/10/2026), setelah longsor material tanah menyumbat aliran Sungai Budhi Gandaki.

Bencana tersebut menyebabkan sejumlah rumah dan infrastruktur rusak, termasuk jembatan yang menghubungkan Distrik Gorkha dengan Distrik Dhading.

Hingga laporan ini disusun, belum ada laporan mengenai korban jiwa.

Pihak berwenang Nepal telah mengimbau warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai, terutama di wilayah hilir, untuk segera mengungsi ke tempat yang lebih aman. Langkah tersebut dilakukan menyusul debit air yang terus meningkat dan aliran sungai yang membawa lumpur pekat.

Dilansir AFP, pejabat setempat mengatakan banjir dipicu oleh longsor material tanah di Desa Chumnubri, Distrik Gorkha, yang berjarak sekitar 100 kilometer di sebelah barat Kathmandu, ibu kota Nepal.

Material longsor tersebut menyumbat Sungai Budhi Gandaki. Sumbatan itu kemudian memicu banjir di wilayah hilir ketika aliran air terdampak oleh perubahan kondisi sungai.

Pejabat birokrasi tertinggi di Distrik Gorkha, Dharmendra Kumar Mishra, mengatakan pemerintah setempat telah meminta warga yang bermukim di sekitar sungai untuk segera menyelamatkan diri.

"Kami telah meminta warga yang tinggal di sepanjang tepi sungai di wilayah hilir untuk mengungsi dan menyelamatkan diri," kata Mishra.

Menurut Mishra, sekitar 12 rumah dan dua jembatan yang berkaitan dengan proyek pembangkit listrik tenaga air mengalami kerusakan akibat banjir.

Dampak banjir juga dirasakan pada akses transportasi. Sungai yang meluap dilaporkan menghanguskan sebuah jembatan jalan raya yang menghubungkan Distrik Gorkha dengan Distrik Dhading. Kerusakan tersebut berpotensi menghambat mobilitas warga dan akses menuju kawasan terdampak.

Kondisi di sepanjang sungai masih menjadi perhatian karena debit air terus meningkat. Ancaman banjir tidak hanya membahayakan permukiman, tetapi juga infrastruktur dan aktivitas masyarakat yang berada di dekat aliran sungai.

Militer dan Polisi Dikerahkan untuk Penyelamatan

Pemerintah Nepal telah mengerahkan personel penyelamat untuk membantu warga yang terancam bencana. Militer dan kepolisian dilaporkan telah tiba di lokasi, sementara pemantauan kondisi dilakukan menggunakan helikopter.

Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, melalui unggahan di media sosial menyampaikan bahwa militer telah menyelamatkan enam orang dari kawasan yang terancam bahaya tanah longsor.

Sementara itu, sebanyak 18 pekerja yang berada di kamp proyek pembangkit listrik tenaga air terdampak banjir berhasil menyelamatkan diri. Belum ada informasi lebih lanjut mengenai tingkat kerusakan keseluruhan pada proyek tersebut

LINGKUNGAN

BPBD: Banjir Padang Rendam 120 Rumah, 498 Jiwa Terdampak

Oleh Redaksi · 11 Okt, 10.37 WIB



BANDA ACEH - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat 498 jiwa terdampak banjir di Kota Padang, Sumatera Barat (Sumbar). Selain itu, sebanyak 120 unit rumah terendam akibat bencana tersebut.

Berdasarkan pendataan BPBD Kota Padang hingga Sabtu (10/10/2026) pukul 22.45 WIB, banjir terjadi di Kecamatan Kuranji, Koto Tangah, dan Nangalo. Wilayah terdampak meliputi Kelurahan Kuranji, Lubuk Minturun, Koto Panjang Ikua Koto, Batipuh Panjang, Tabinng Banda Gadang, serta Gurun Laweh.

"Berdasarkan data sementara, tercatat sebanyak 498 jiwa terdampak di sejumlah wilayah. Selain itu, sekitar 120 unit rumah terendam banjir," demikian unggahan akun Instagram @pusdalopskotapadang, Minggu (11/10/2026).

BPBD Kota Padang melaporkan, khusus di Kecamatan Kuranji, terdapat empat unit rumah rusak sedang dan satu unit rumah rusak berat. Selain itu, akses jalan masyarakat di kawasan

Guo, Kecamatan Kuranji, dilaporkan terputus akibat banjir.

Sebanyak 238 warga yang terdampak banjir di sejumlah lokasi juga telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan.

Rinciannya, sebanyak 20 jiwa dievakuasi dari Lapau Munggu, Kelurahan Kuranji; lima jiwa dari Guo, Kelurahan Kuranji; 30 jiwa dari Perumahan Abi, Koto Panjang Ikua Koto; lima jiwa dari Kampung Apa, Koto Panjang Ikua Koto; serta 178 jiwa dari Perumahan Lumin Park, Lubuk Minturun.

Dalam unggahan tersebut, Kepala Pelaksana BPBD Kota Padang Hendri Zulviton mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan, seperti banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan pohon tumbang.

"Masyarakat yang berada di sekitar sungai, daerah rawan banjir, serta kawasan dengan kondisi tanah labil diminta untuk selalu memantau kondisi lingkungan dan segera menjauhi lokasi berbahaya apabila terjadi peningkatan debit air," ujarnya

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



LINGKUNGAN

Kondisi Terkini Banjir Bandang Terjang Padang, Waspada Banjir Susulan

Oleh Redaksi · 11 Okt, 08.27 WIB



BANDA ACEH – Banjir bandang menerjang sejumlah wilayah di Kota Padang, Sumatera Barat, Sabtu (10/10/2026). Bencana itu terjadi setelah hujan deras mengguyur kawasan tersebut sejak pukul 12.20 WIB hingga membuat beberapa anak sungai meluap.

Detik-detik banjir bandang menerjang epremukiman warga terekam kamera CCTV. Tampak warga di Kawasan Perumahan Cluster Luminpark panik lantaran air berwarna keruh kecoklatan semakin tinggi menggenangi wilayah mereka.

Sebagian warga terpaksa naik ke loteng untuk menyelamatkan diri dari terjangan banjir.

Komandan Tim Lapangan SAR Padang, Tri Desyu mengatakan, lokasi yang terdampak banjir seperti Kampung Guo, Kuranji, hingga Lumin Park kawasan Lubuk Minturun, Koto Tengah.

“Informasi kita terima dan tim kita persiapkan untuk melaksanakan evakuasi, yang mana ada di dua titik, Kecamatan Koto Tengah, Kelurahan Koto Panjang Ikur sama Kelurahan Lubuk Minturun,” kata dia dalam keterangannya.

Tim SAR gabungan telah mengevakuasi terhadap 40-55 jiwa yang terjebak banjir. Mereka selanjutnya dibawa ke lokasi aman. #

“Untuk unsur yang terlibat saat ini tim gabungan dari TNI, Polri, kemudian dari Brimob juga, sekira 70 orang, Basarnas sendiri, BPBD provinsi dan kota, PMI, Pol PP, Damkar, dan organisasi masyarakat lainnya,” ujarnya.

“Untuk evakuasi masyarakat sementara, itu di tempat yang tinggi yang sudah kita koordinasikan dengan RT, RW, bahkan

dengan lurah setempat untuk di lokasi kejadian,” kata dia.

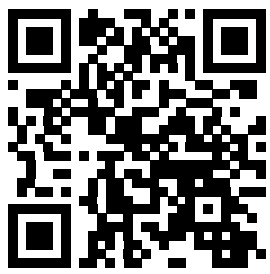
Petugas gabungan dari unsur BPBD, Basarnas, serta TNI-Polri terus bersiaga di lokasi untuk menyisir area permukiman warga. Penanganan evakuasi difokuskan pada penyelamatan kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, serta warga yang membutuhkan bantuan darurat.

BPBD Kota Padang mengimbau seluruh masyarakat yang berada di sekitar kawasan perumahan agar tetap tenang, meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bahaya susulan, serta mematuhi seluruh arahan yang disampaikan oleh petugas di lapangan.

Masyarakat juga diminta untuk segera melapor ke posko penanganan bencana terdekat apabila membutuhkan bantuan evakuasi medis atau logistik darurat selama proses penanganan berlangsung

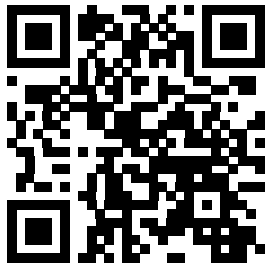
BACA LEBIH LENGKAP
www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP
www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



ANEKA BERITA

4 BERITA

OPINI

Dulu Saya Simpati ke Gibran

Oleh Redaksi · 11 Okt, 20.56 WIB



Oleh:Prof Henri Subiakto

SAYA kenal Pak Jokowi sebelum beliau jadi presiden. Saya kagum dengan penampilannya yang sederhana. Halus tutur katanya, dan tampak kelihatan sabar. Pak Jokowi itu berbeda dengan elite Politik lain. Dia bukan keturunan ningrat. Bukan keluarga pejabat. Dia hanya berasal dari rakyat biasa, seperti kebanyakan kita.

Itulah kekuatan Jokowi yang membuat jadi sosok yang menarik simpati. Jokowi jadi tokoh yang sangat berbeda latar belakang dan karakternya di banding elite-elite lain di tingkat nasional. Berbeda dengan Prabowo. Berbeda dengan SBY, berbeda pula dengan Megawati dan tokoh-tokoh lain. Jokowi itu atributnya representasi rakyat kecil.

Daya tarik kesederhanaan Jokowi juga tampak dari penampilan kesederhanaan aktivitas anaknya, salah satunya Gibran. Sebagai anak presiden, Gibran dikesankan

hanya sibuk bisnis martabak. Tidak tergantung kewenangan orang tua. Seolah Gibran tak mau berpolitik dan tak tertarik jabatan. Dia anak yang sederhana, sebagaimana bapaknya.

Sayapun pernah ketemu di Bandara Solo, Gibran tampak tidak dikawal dan pergi ke Surabaya seperti rakyat biasa. Naik satu pesawat dengan saya. Sama-sama kena delay dan sempat kehujanan. Itu membuat saya kagum, ternyata anak presiden ini tidak minta difasilitasi khusus ataupun dikawal.

Itu foto yang saya ambil setelah permissi, namun dia membiarkan permisi, namun dia membiarkan tanpa ekspresi. Saat itu saya melihat kesederhanaan Gibran yang diberitakan sibuk bisnis martabak, dan bisnis pisang untuk adiknya Kaesang.

Tapi setelah Gibran jadi Walikota Solo, sayapun mulai curiga, terhadap agenda yang ada di belakangnya. Terlebih pembangunan infrastruktur yang dihasilkan pemerintahan Jokowi, ternyata

banyak masalah dan menenggelamkan pemerintah ke dalam beban utang yang sangat berat. Di era Jokowi terjadi ketergantungan ekonomi pada oligarki dan cengkeraman asing yang mengkhawatirkan.

Apalagi saat kemudian Gibran terbaca diberi jalan dan difasilitasi bisa maju jadi calon wakil presiden di usianya yang masih sangat muda, dengan menabrak ketentuan UU. Hingga terjadi rekayasa regulasi untuk memfasilitasi anak ini.

Karena merekayasa regulasi inilah saya sudah tidak percaya lagi dengan mekanisme demokrasi yang memfasilitasi politik dinasti Jokowi.

Sejak Pemilu dan Pilpres 2024, ketidakjujuran, permainan pencitraan, pemanfaatan aparat dan lembaga negara untuk menopang kekuasaan dinasti Jokowi sudah tampak semakin terbuka, walau selalu dicoba ditutupi kekuatan para pendukungnya, termasuk yang ada di aparat negara.

LIFESTYLE

Ternyata Kartu Nikah Digital Bisa Diakses melalui Simkah, Ini Caranya!

Oleh Redaksi · 11 Okt, 06.22 WIB



BANDA ACEH -Ada info baru dari Kementerian Agama (Kemenag) untuk para pasangan suami-istri. Kartu Nikah Digital kini dapat diakses secara daring melalui Sistem Informasi Manajemen Nikah (Simkah).

Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Ahmad Zayadi mengatakan, masyarakat yang telah memiliki akun Simkah dapat mengakses dan mengunduh Kartu Nikah Digital melalui laman resmi Simkah.

“Layanan ini diharapkan dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh dokumen administrasi pernikahan,” kata Zayadi, dikutip dari laman Kemenag, Minggu 11 Oktober 2026.

Berikut cara mendapatkan Kartu Nikah Digital melalui akun Simkah, khususnya bagi masyarakat yang mendaftar nikah secara daring:

1. Akses laman simkah4.kemenag.go.id
2. Pilih menu “Masuk/Daftar” dan masuk menggunakan akun yang telah terdaftar.
3. Pilih menu “Kartu Nikah Digital” untuk mengunduh kartu.

Bagi masyarakat yang belum memiliki akun Simkah, pengajuan Kartu Nikah Digital dapat dilaku-

kan melalui KUA tempat akad nikah dilangsungkan.

“Silakan membawa buku nikah asli ke KUA tempat akad nikah dilangsungkan. Petugas KUA akan melakukan verifikasi data pernikahan terlebih dahulu. Setelah data terverifikasi, Kartu Nikah Digital akan dikirimkan kepada pemohon melalui email atau WhatsApp,” kata Zayadi.

Kartu Nikah Digital memiliki sejumlah manfaat bagi masyarakat, yaitu:

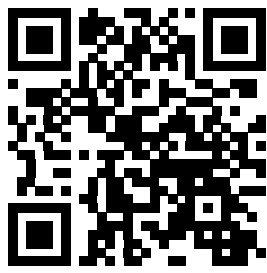
1. Memudahkan penyimpanan dokumen karena kartu dapat disimpan dalam bentuk digital atau dicetak dengan ukuran menyerupai kartu ATM sehingga praktis dibawa di dalam dompet.
2. Dapat menjadi dokumen pendukung untuk keperluan administrasi tertentu yang membutuhkan bukti status pernikahan.
3. Kartu ini membantu mencegah pemalsuan dokumen pernikahan karena dilengkapi kode QR yang terhubung dengan aplikasi Simkah Web untuk keperluan verifikasi data.

“Pemanfaatan teknologi digital dalam layanan administrasi pernikahan diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh layanan secara lebih praktis dan efisien,” pungkas Zayadi

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



HIBURAN

Link Video Asupan Malam Minggu Viral Terbaru, Bilqis Banyuwangi hingga A Day in My Life Bikin Penasaran!

Oleh Redaksi · 11 Okt, 10.50 WIB



BANDA ACEH -Link video asupan malam minggu viral terbaru ramai dicari, mulai dari Bilqis Banyuwangi hingga A Day in My Life yang bikin warganet penasaran.

Pencarian mengenai link video asupan malam Minggu viral terbaru ramai menarik perhatian pengguna internet.

Sejumlah kata kunci, mulai dari Bilqis Banyuwangi, A Day in My Life, hingga Hijab Cantik Hyper, ikut menjadi bahan pencarian warganet.

Namun, di balik rasa penasaran tersebut, ada sejumlah hal yang perlu diperhatikan sebelum membuka tautan video yang beredar.

Bilqis Banyuwangi menjadi salah satu kata kunci yang muncul dalam daftar tautan video yang beredar di internet.

Nama tersebut dikaitkan dengan pencarian asupan malam Minggu, istilah informal yang kerap digunakan untuk menyebut konten hiburan yang dicari pengguna saat akhir pekan.

Selain itu, A Day in My Life juga menjadi frasa yang menarik perhatian.

Dalam dunia konten digital, istilah tersebut umumnya digunakan untuk menggambarkan keseharian seseorang melalui rekaman aktivitas sehari-hari.

Namun, belum tersedia informasi terverifikasi yang memastikan isi video dengan judul tersebut maupun hubungannya dengan nama yang beredar.

Karena itu, pengguna internet sebaiknya tidak langsung menyimpulkan isi rekaman hanya berdasarkan judul atau keterangan singkat.

Nama Hijab Cantik Hyper turut muncul dalam daftar kata kunci yang dibagikan.

Kendati demikian, identitas orang yang mungkin dikaitkan dengan video tersebut dan isi kontennya belum dapat dipastikan secara independen.

Tingginya rasa penasaran terhadap video viral terkadang membuat pengguna internet langsung

membuka tautan tanpa memeriksa sumbernya

Padahal, tautan dari platform berbagi file yang tidak dikenal berpotensi mengarahkan pengunjung ke halaman mencurigakan.

Risikonya bukan hanya salah mendapatkan informasi.

Pengguna juga bisa menghadapi upaya pencurian data, penipuan digital, hingga permintaan mengunduh aplikasi yang tidak jelas asal-usulnya.

Untuk menghindari masalah tersebut, periksa alamat situs sebelum mengakses tautan.

Jangan memasukkan kata sandi, kode verifikasi, atau informasi pribadi pada halaman yang tidak tepercaya.

Jika sebuah tautan meminta izin yang tidak relevan dengan kebutuhan, sebaiknya segera tinggalkan halaman tersebut.

Tren pencarian video asupan malam Minggu menunjukkan bagaimana rasa penasaran dapat mendorong sebuah topik menyebar dengan cepat.

Akan tetapi, pengguna internet tetap perlu membedakan informasi yang sudah terkonfirmasi dari klaim yang hanya beredar melalui unggahan atau pesan berantai.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah menjaga privasi.

Apabila sebuah video diduga memuat rekaman pribadi, pengguna sebaiknya tidak ikut menyebarkan atau mengunduhnya tanpa persetujuan pihak yang bersangkutan.

Pada akhirnya, pencarian Bilqis Banyuwangi, A Day in My Life, dan Hijab Cantik Hyper perlu dilakukan secara bijak.

Jangan sampai keinginan mengetahui video yang sedang ramai justru berujung pada risiko keamanan digital atau penyebaran informasi yang belum terbukti kebenarannya.

OPINI

Nusron Wahid Bikin KPK Tidak Berkutik

Oleh Redaksi · 11 Okt, 06.17 WIB



Oleh:Rosadi Jamani

NUSRON WAHID, Menteri ATR/BPN sudah masuk geng orang sakti di negeri ini. Level kesaktiannya sudah melampaui si Pitung, Superman, dan tukang sihir yang bisa menghentikan waktu. KPK memanggilnya dianggap sepele alias tak diindahkan. Kalau saya dipanggil, sudah kencing dalam celana. Posing, ups.

Pada Rabu 7 Oktober 2026, penyidik KPK sudah mengirim surat panggilannya. Nusron dengan santai membalas, “Maaf, ada agenda internal.”

Ketua KPK Setyo Budiyanto langsung merespons tajam. “Menteri ini kan pernah menyatakan di media hari Jumat 18 September, akan menghormati proses hukum.

KPK berharap bersangkutan komitmen. Jadi kalau alasan sudah ada terjadwal kegiatan di kementerian, seperti dengan toleransi waktu beda minggu, kurang bisa atur waktu.”

Juru bicara KPK Budi Prasetyo ikut mengimbau agar pejabat publik jadi teladan. Jangan sampai muncul persepsi menunda-nunda penegakan hukum. Karena, keterangan Nusron dibutuhkan untuk merangkai konstruksi utuh perkara suap pengurusan HGB PT Summarecon Agung Tbk.

Konstruksi itu memang spektakuler. Delapan orang sudah jadi tersangka. Empat di antaranya disebut orang kepercayaan Nusron: eks Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, politikus Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, Erwin, dan Muhammad Fakhry.

Jaringan ini mengepul dana suap miliaran dari berbagai layanan pertanahan lalu menyetorkannya ke Fahd sebagai penampung akhir.

Saat OTT di Jabodetabek 14 September 2026, KPK menyita barang bukti rekor sejarah: uang tunai lebih dari Rp106,3 miliar. Di rumah Arif Sugiyanto ditemukan beberapa koper merah berisi Rp31,86 miliar, 2.611.500 dolar

AS, 1.974.500 dolar Singapura, 910 riyal Arab Saudi, dan 981 ringgit Malaysia.

Di rumah Rizal Pahlevi ada Rp896 juta, di rumah Kepala Kantah Kabupaten Bogor I Son-tang Coin Manurung Rp49,5 juta, dan di rumah Kepala Seksi Pene-tapan Hak Zimamun Ni’am Aulawi Rp8 juta.

Belum cukup, pada 24 September 2026 KPK mengeledah Kanwil BPN Jawa Timur selama hampir sebelas jam dan menemukan uang tunai ratusan juta rupiah (termasuk lembaran dolaer AS dan dolar Singapura), beberapa perhiasan diduga emas estimasi puluhan juta, dokumen, barang bukti elektronik, serta sejumlah ATM yang diduga rekening penampungan. Semuanya diduga berasal dari para pemohon layanan pertanahan di lingkungan Kanwil tersebut.

Tapi kesaktian Nusron tak berhenti di situ. Di tengah keramaian itu muncul ocehan Gus Lilur. Menurutny, ada dua Toyota Land Cruiser berangkat dari kawasan selatan-timur Jakarta membawa uang kira-kira Rp480 miliar menuju Muktamar NU ke-35 di Jombang.

Kedua mobil itu tidak dikendarai sendiri, melainkan dinaikkan ke dua kendaraan towing. Masing-masing berisi sekitar Rp240 miliar. Komposisinya: sekitar Rp150 miliar dari oknum institusi berinisial P, Rp150 miliar dari oknum institusi berinisial B, dan sisanya Rp180 miliar “kreasinya NW”. Ya, NW itu Nusron Wahid. Info itu, kata Gus Lilur, bersumber dari pengakuan orang OTT dan digital forensik HP yang disita.

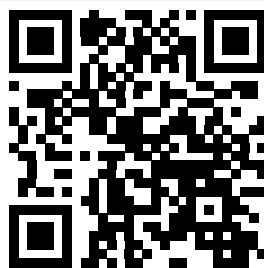
Nuan bayangkan, saat KPK masih sibuk menghitung koper merah berisi ratusan miliar di rumah orang kepercayaannya, di tempat lain dua Land Cruiser diangkut towing sedang ...

» Selengkapnya di www.harianaceh.co.id

BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

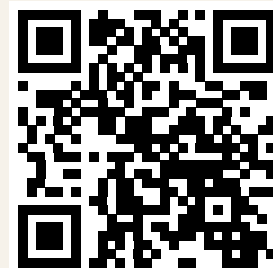
Pindai kode QR untuk berita terbaru



BACA LEBIH LENGKAP

www.harianaceh.co.id

Pindai kode QR untuk berita terbaru



REDAKSI

PENERBIT PT. Harian Aceh Indonesia